

Karya Ilmiah

Partai Politik Islam di Indonesia dan jaringan ideologi Timur-tengah



Nama : Syafiuddin Fadlillah
NIDN. : [0318067702](#)

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Al-azhar Indonesia

2018

ABSTRAK

Ideologi Timur tengah di Indonesia berkembang melalui beberapa fase, dari penyebarannya yang tak memiliki afiliasi politik tertentu hingga penyebarannya yang sangat masif dan kental dengan nuansa politik tertentu dan begitu terorganisasi dengan baik dan amat rapi.

Salah satu organisasi tempat penyebaran ideologi Timur Tengah itu adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ideologi Timur tengah di PKS memiliki kemiripan dengan ideologi Ikhwanul Muslimin (IM) yang ditranfer PKS melalui alumni-alumni Timur tengah dengan menjadikan pondok-pondok pesantren, masjid dan juga kampus sebagai instrument penting dalam mentransfer ideology diatas.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa PKS secara visi dan misi memiliki kemiripan ideologi dengan IM, bahkan situs website IM menyatakan PKS sebagai cabang resmi IM di Indonesia, walau secara hirarki organisasi, menurut hasil wawancara Tim peneliti Al-Azhar dengan tokoh-tokoh PKS dapat disimpulkan ketidak ada hubungan dua organisasi ini, yakni antara IM dan PKS.

Kata Kunci : Ideologi Timur Tengah, Ikhwanul Muslimin, PKS, Hubungan Organisasi Internasional

DAFTAR ISI PENELITIAN

ABSTRAK PENELITIAN	I
KATA PENGANTAR	II
UCAPAN TERIMA KASIH	III
BAB 1	
PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kerangka Pemikiran	6
1.5. Sistematika Pembahasan	11
BAB II	
LANDASAN TEORI	
1.1. Kerangka Konseptual	13
1.1.1. Teori Kekuasaan	13
1.1.2. Teori <i>Musyarakah Siyasiah</i>	14
BAB III	
METODOLOGI PENELITIAN	
1.1. Ruang Lingkup Penelitian	
1.1.1. Batasan Objek Masalah	17
1.1.2. Karakteristik Data	17
1.3. Paradigma Penelitian	18
1.4. Metode Penelitian	19
1.5. Metode Pengumpulan Data	20
1.6. Unit Analisis Penelitian	22
1.7. Metode Analisis Data	23

BAB IV

PENGARUH IDEOLOGI TIMUR TENGAH TERHADAP KEPUTUSAN- KEPUTUSAN POLITIK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

1.1. Hubungan Pemikiran Indonesia dengan Timur Tengah	24
1.2. Tipologi Pengaruh Pemikiran Timur tengah di Indonesia	27
1.3. Penopong pemikiran Timur Tengah di Indonesia	28
1.3.1. Pondok-Pondok Pesantren	28
1.3.2. Masjid	29
1.3.3. Kampus	30
1.4. PKS dan Pemikiran Hasan Al-Banna (Ikhwanul Muslimin)	30
1.5. Sikap PKS terhadap azas islami partai politik	32
1.6. Sikap PKS terhadap Penerapan Syariat Islam di Indonesia	33
1.7. Sikap PKS terhadap Terorisme dan Radikalisasi di Indonesia	36
1.8. Politik Luar Negeri PKS	37
1.9. Sikap PKS terhadap NKRI	39
1.10. PKS, Peluang dan tantangan pada pemilu 2014	39

BAB V

KESIMPULAN	41
REFERENSI	44
LAMPIRAN-LAMPIRAN	46

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengaruh ideologi politik dan budaya Timur tengah ke Indonesia terdorong karena beberapa faktor penting diantaranya banyaknya muslim Indonesia aktif menuntut ilmu ke Timur tengah, baik sebagai pelajar atau mahasiswa maupun sebagai konsumen penerbitan dan media elektronik ¹.

Disisi lain, pemerintah, organisasi amal, dan donor pribadi Timur tengah dengan giat menyebarkan interpretasi mereka tentang Islam di kawasan itu, dengan cara membiayai infrastruktur islam seperti masjid, sekolah dan madrasah, mensponsori kunjungan da'i dan penerbitan buku buku dan jurnal, serta menyediakan beasiswa belajar di negeri-negeri arab ².

Sebelumnya, hubungan Indonesia dengan Timur tengah berlangsung sekitar abad ketujuh Masehi menurut Teori Makkah³ , hubungan ini baru sebatas hubungan dagang dan sosial dan belum pada hubungan pemikiran dan ideologi bermuara pada politik praktis ⁴ .

Hubungan Ideologi dan pemikiran serta politik mulai terjadi manakala Muhammad Natsir pendiri Masyumi mulai melakukan hubungan kontak pemikiran dengan tokoh tokoh Islam di Pakistan, Mesir, Saudi Arabia dan Negara negara Timur tengah lainnya, puncak dari kuatnya hubungan Natsir dengan ideologi Timur tengah ini ketika Ia membentuk partai islam Masyumi yang menyatukan semua organisasi Islam dalam satu kendaraan politik.

Namun hubungan pemikiran dan ideologi politik antara Natsir dan tokoh-tokoh Timur tengah ini terhenti pada masa orde baru, ideologi politik islam simbolistik tidak

¹ Greg Fealy dan Anthony Bubalo, 2007, *Jejak Kafilah*, hal. 86, Mizan, Bandung.

²Ibid

³ Ada tiga teori yang digunakan oleh para sejarawan muslim dalam mengungkap fakta masuknya islam di Indonesia, *Pertama* Teori Makkah, yang menyebutkan bahwa Indonesia dimasuki oleh pedagang arab yang langsung datang dari Makkah dan Mesir pada abad ketujuh pada masa pemerintahan Umayyah, *Kedua* Teori Gujarat yang menyebutkan bahwa islam masuk ke Indonesia dibawa dari Gujarat pada abad ke tiga belas. dan *teori ketiga* adalah Teori Persia yang memandang orang persialah yang membawa Islam ke Indonesia, itu didasarkan pada persamaan ritual Persia dan Indonesia.

⁴Ahmad Mansur Suryanegara, 1995, *Menemukan Sejarah*, Mizan, Bandung

boleh digunakan lagi dalam partai politik, partai politik tidak diperbolehkan menggunakan azas Islam, ini membuat Natsir dan pengikutnya harus menggunakan cara lain dalam menyebarkan ideologi dan pemikiran Timur tengah di Indonesia.

Era perkembangan ideologi dan pemikiran Timur tengah di Indonesia memulai fase barunya yang ditandai dengan berdirinya lembaga-lembaga sosial beberbendara yayasan-yayasan kemanusiaan dan dakwah islam, mereka tidak menyentuh politik praktis lagi namun menyebarkan ideologi-ideologi Timur tengah melalui yayasan-yayasan sosial dakwah ini.

Berdirilah Dewan Dakwah Islam Indonesia yang dipimpin M. Natsir, Al Haramain pimpinan Hidayat Nur Wahid, As-Shofwah dan El-Data pimpinan Yusuf Harun serta institusi-institusi islam lainnya yang mengajarkan agama islam sebagai sarana mentransfer pemikiran dan ideologi Timur tengah, kedepan nanti lembaga-lembaga dakwah inilah yang menjadi basis partai politik islam di Indonesia seperti LDK yang mendirikan KAMMI dan berafiliasi ke Partai Keadilan Sejahtera.

Kawan-kawan M. Natsir juga mulai bergabung di Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), begitu juga para alumni-alumni Timur tengah juga mulai bergabung, dan diantara pengurus DDII ini juga tidak sedikit yang menjadi pengurus pusat di PKS seperti Daud Rasyid dan juga dipartai lainnya seperti PBB, Natsir adalah tokoh islam Indonesia yang memiliki hubungan baik dengan Personil dan donatur-donatur Timur tengah dan setelah sepeninggalan Natsir kedekatan hubungan dengan Timur tengah dilanjutkan oleh kader kadernya seperti Syuhada Bahri dll.

Kedekatan M. Natsir dengan Timur tengah terlihat dari banyaknya rekomendasi yang ia berikan terhadap calon mahasiswa yang ingin belajar ke Timur tengah, dan rekomendasi M. Natsir bagi beberapa universitas di Timur tengah sangatlah terpercaya ⁵.

Oleh Pemerintah Saudi Arabia, M. Natsir pernah dianugrahi gelar kehormatan khusus raja (*Ja`izatul Malik*) karena jasa jasanya menyebarkan pemahaman yang dianggap cocok oleh Saudi Arabia di Indonesia ⁶.

⁵Salah satu syarat diterimanya mahasiswa asing di beberapa Universitas Timur tengah adalah keharusan membawa rekomendasi tokoh yang diakui pihak Timur tengah, Surat rekomendasi ini sangat menentukan kelulusan mahasiswa asing bahkan terkadang bisa mengabaikan syarat akademis lainnya.

⁶Website Partai bulan Bintang diakses 2009

Setelah tumbang era Soeharto pada tahun 1997, keran ideologi Timur tengah seolah menemukan jalannya kembali, itu karena dibolehkannya pendirian partai politik berazaskan islam. Sedari awal PKS memang tidak menginginkan kader-kadernya masuk dunia praktis namun lebih memilih menggandeng tokoh nasional dalam negeri untuk maju sebagai calon pemimpin namun dengan syarat tokoh bersangkutan haruslah mendukung dakwah PKS, saat itu PKS memilih Amin Rais sebagai tokoh yang sejalan dengan ideologi Timur tengah namun Amin Rais menganggap baju Islam terlalu sempit untuk digunakannya diperpolitikan Indonesia, sikap Amin ini kemudian memaksa tokoh-tokoh tarbiah ini harus mengambil jalan darurat memasuki dunia politik praktis sebagai sarana memperjuangkan dakwah melalui parlemen dan eksekutif.

Amin Rais tidak menginginkan partai islam yang murni, menurutnya baju islam terlalu kecil untuk ia pakai, karena sikap Amin yang tak mau mendirikan partai politik islam ini maka PKS kemudian dengan suara mayoritas mendirikan Partai Keadilan (PK) yang kemudian berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Era reformasi adalah masa bermunculannya partai-partai yang berazaskan Islam, Komisi Pemilihan Umum mencatat puluhan partai politik berazaskan islam bermunculan belum lagi partai partai nasionalis yang berazaskan ideologi selain islam.

Sejak tahun 1977 hingga 1997 ummat Islam hanya memiliki kendaraan politik Partai Persatuan Pembangunan sebagai partai yang mengakomodasi kepentingan politik praktis ummat, itu karena pemerintah membatasi pendirian partai politik hanya menjadi dua aliran, Pertama aliran agamis yang tersalurkan dalam PPP dan Nasionalis yang tersalurkan dalam Partai Demokrasi Indonesia.

Setelah Masyumi bubar, hubungan Timur tengah dengan tokoh-tokoh Indonesia dilakukan secara personal dan memasuki dunia pendidikan terutama pendirian pesantren dan lembaga-lembaga keislaman.

Hubungan dua arah yang terjalin antara pesantren tradisional dan lembaga informal Timur tengah membuat pengaruh ideologi Timur tengah di Indonesia semakin kokoh dan kuat.

Partai Keadilan Sejahtera adalah partai yang didirikan oleh aktivis dakwah 1980-an yang melihat peluang untuk mendirikan partai politik di tahun 1997 setelah mereka melakukan aktivitas dakwah dan sosialnya melalui jaringan kampus dan sosial

kemasyarakatan sebagai reaksi dari tersumbatnya semangat keislaman dalam partai politik praktis.

PKS adalah partai yang mengadopsi ajaran ajaran Hasan Al-Banna dan beberapa pemikir Timur tengah lainnya, Al-Banna adalah seorang tokoh Spiritual Mesir yang mendirikan organisasi Ikhwanul Muslimin pada 1928.

Hubungan PKS dengan IM terus terbina apalagi setelah terlibatnya PKS dalam politik praktis sebagai imbas dari terbukannya keran politik pada era reformasi pada tahun 1997 pasca tumbanganya orde baru dibawah pemerintahan Soeharto.

PKS sebenarnya tidak ingin masuk dunia politik praktis karena pengalaman negara-negara islam yang ketika masuk politik praktis dan mampu memenangkan persaingan secara demokratis akan selalu digulingkan kekuatan global seperti FIS di Al Jazair dan Hamas di Palestina, namun karena mayoritas kader tarbiah menginginkan masuk dunia politik praktis dengan mengacu pada pemikiran IM maka keputusan masuk politik praktispun diambil secara syura.

Hubungan PKS dengan Timur tengah merupakan hubungan yang terbentuk jauh sebelum institusi ini terlibat dalam politik praktis, karenanya pengaruh ideologi Timur tengah di partai ini sangat terlihat dari isu dan kebijakan yang diangkat .

PKS sering membawa isu Timur tengah terutama kasus kemerdekaan Palestina yang masih terjajah Zionis Israel, dan dalam beberapa kesempatan juga melakukan pendekatan ke konsetuena dengan kasus keharusan Palestina merdeka sebagai bagian dari *Ukhuah Islamiyyah Alamiyyah*.

Pengaruh ideologi Timur tengah terhadap pendirian partai politik Islam di Indonesia mulai terlihat dari penggunaan Azas ideologi partai yang tak bisa dikompromi lagi yaitu keharusan penggunaan azas Islam atau Al-Quran dan Hadist.

Pengaruh ideologi politik Timur tengah semakin terlihat dalam tataran kebijakan-kebijakan parpol islam yang sering mengangkat masalah Timur Tengah dalam politik praktis, bahkan melakukan politik tawar-menawar atau kontrak politik seperti PKS yang mencantumkan kasus kemerdekaan Palestina disalah satu nota kontrak politik SBY dengan PKS pada pemilu 2004 lalu .

Ideologi Timur tengah ini kemudian mampu mendapat simpati rakyat Indonesia bahkan mempengaruhi tokoh-tokoh pendiri partai politik Islam terutama PKS,PBB dan

juga PPP hingga kemudian mampu mempengaruhi pengambilan kebijakan politik nasional.

Kebijakan PKS terhadap masalah-masalah Nasional mulai terlihat adanya pengaruh ideologi Timur tengah, seperti maraknya pendirian bank-bank syariah dan semakin banyaknya Investor Timur tengah yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, PKS juga secara tersirat berkeinginan menjadikan Indonesia sebagai negara bercorak Timur tengah, yang konsisten dalam menjalankan syariat islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, semua itu adalah bukti betapa ideologi Timur tengah mulai mmenancarkan kekuatannya di wilayah politik praktis setelah sebelumnya mereka menguatkan kekuatannya diarea sosial kemasyarakatan.

1.2. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Bermunculannya ideologi Timur tengah di Indonesia seperti Ikhwanul Muslimin (IM), Salafi, Hizbut Tahrir dan Syiah menjadikan Indonesia sebagai korban perang ideologi Timteng, jika di Timur tengah muncul konflik akibat tegangnya hubungan antar pemeluk ideologi ini maka Indonesia sebentar lagi pasti akan mengalami hal yang sama, itu semua sebagai bukti dari menguatnya hubungan ideologi-ideologi Timur tengah dengan Indonesia.

Perubahan sosial politik di Timur tengah yang radikal seperti di Iraq, Afganistan dan beberapa negara Timur tengah lainnya adalah sebuah fenomena dan merupakan situasi tarik ulur fase perubahan pemikiran dan ideologi mahasiswa Timur tengah Indonesia yang sedang melakukan studi atau bagi WNI yang berada di kawasan tersebut.

Kesamaan beberapa aspek sosial Timur tengah dengan sosial Indonesia juga menjadi pertanda lain dari telah terjalinnya hubungan dan pengaruh ideologi Timur tengah di Indonesia .

Hubungan yang sangat lama terjalin antara Indonesia dan Timur tengah dan mayoritas penduduk Indonesia yang muslim, juga perhatian Timur tengah terhadap Indonesia disisi lainnya menjadikan pengaruh ideologi Timur tengah di Indonesia makin tak terbendung.

Karenanya penelitian ini nanti harus menjawab pertanyaan penelitian berikut ini :

Bagaimanakah pengaruh ideologi Timur tengah (IM) di Indonesia khususnya terhadap tokoh-tokoh PKS yang kemudian mempengaruhi kebijakan politik PKS yang bercorak Timur tengah ?

1.3. Tujuan Penelitian

Merujuk pada perumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui adanya pengaruh ideologi Timur tengah terhadap partai politik Islam Indonesia khususnya PKS .
2. Mengetahui tujuan akhir dari pendirian PKS yang berideologikan islam di Indonesia, apakah partai politik islam ini menjadikan pendirian parpol Islam sebagai batu loncat untuk mendirikan negara yang berideologikan Islam .
3. Mengetahui sikap PKS terhadap isu-isu nasional yang terkesan bertentangan dengan ideologi Timur tengah seperti penerapan syariat islam di indonesia dan sikap terhadap radikalisasi dan terorisme.
4. Mengetahui peluang kemenangan PKS dalam pemilu 2014 nanti, mampukah PKS mengungguli Masyumi atau justru sebaliknya tetap stagnan, dan justru menjadi era tidak populernya partai politik Islam.
5. Mengetahui apakah dengan memiliki ideologi Timur tengah menjadikan PKS dijalan kemenganan atau dengan menghapus hubungan ideologi reiligi di partai justru akan memenangkan parpol Islam.

1.4. Kerangka Pemikiran

Partai politik adalah suatu kelompok yang teroganisir yang anggota anggotanya mempunyai orientasi dan cita cita sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh

kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan kebijaksanaan mereka⁷.

Partai Politik berfungsi sebagai sarana komunikasi politik antara masyarakat dengan pengambil keputusan selanjutnya partai nantinya akan melakukan interest articulation yaitu merumuskan kepentingan setelah mendengar pendapat masyarakat.

Partai politik juga berfungsi sebagai sarana sosialisasi politik yang mencakup proses seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap phenonmena politik. Partai politik juga berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik juga partai politik berfungsi sebagai sarana pengatur konflik⁸.

Partai ideologi atau partai azas biasanya mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijaksanaan pimpinan dan berpedoman pada disiplin partai yang kuat dan mengikat, terhadap calon anggota diadakan saringan sedangkan untuk menjadi pimpinan disyaratkan lulus dalam beberapa tahap percobaan dan dipungut iuran secara teratur untuk memperkuat ikatan batin dan kemurnian ideologi⁹.

Partai politik islam di Indonesia muncul di era reformasi setelah kejatuhan presiden Soeharto yang tidak mengizinkan partai politik berideologikan selain ideologi Pancasila dan UUD 1945, setelah partai politik bebas menentukan azas maka muncullah partai politik Islam yang berideologikan Islam.

Diantara partai politik Islam yang muncul adalah PPP yang tadinya adalah partai yang berideologikan Pancasila dan setelah diperbolehkan memilih azas sendiri maka dipilihlah Islam sebagai azas ideologi partai, juga muncul partai PBB, PBR, dan PKS dan sejumlah partai Islam lain muncul.

Ada yang lahir karena euforia demokrasi namun ada juga partai yang lahir sebagai buah perjuangan panjang setelah berjuang melalui organisas non partai politik karena tuntutan rezim orde baru saat itu.

Jaringan Intlektual Timur tengah di Indonesia yang berlangsung sejak zaman Nusantara terlihat dari munculnya Ulama ulama ternama di Timur tengah yang berasal dari Indonesia semakin pula menguatkan pengaruh Timur tengah di Indonesia.

⁷Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu Politik*, , 1977, Gramedia, hal. 160, cet. 24

⁸ ibid, hal 164

⁹ ibid, hal 166

Ahmad Al-Khatib, Yasin Al-Padangi Yusuf Al-Makassari adalah Intelektual Indonesia yang sangat berpengaruh di Timur tengah bahkan Ahmad Al-Khatib pernah ditunjuk menjadi Imam Besar Masjidil Haram sebelum akhirnya Ia kembali ke Indonesia untuk kemudian menyebarkan ideologi nya di Indonesia dengan mendirikan Tarekat Naqshabandiyah di Sambas Kalimantan Barat.

Hubungan pemikiran Indonesia dengan Timur Tengah kemudian menjadi begitu intens dan berkualitas manakala Tokoh-tokoh Indonesia menjadikan Ideologi Timur Tengah sebagai falsafah politik praktis yang ditandai dengan berdirinya Partai Politik Islam Indonesia seperti PKS.

Secara Historis kawasan Timur tengah dan Indonesia sebagai kawasan baru yang sangat strategis dan berkembang memiliki beberapa persamaan dengan kawasan Timur tengah diantaranya adalah sebagai negara korban Imperialisme Barat dan kemudian mampu bangkit dan memerdekakan diri dari cengkraman Barat.

Palestina dan Indonesia telah lama menjalin hubungan yang diwujudkan dengan terjalinnya komunikasi antara tokoh-tokoh politik Indonesia diantaranya Muhamad Natsir yang sering mengadakan hubungan komunikasi diplomasi dengan Al-Hajj Husaini tokoh perjuangan Palestina melawan Israel ¹⁰.

Mesir adalah negara yang secara aktif mendukung kemerdekaan Indonesia, dan Mesir jugalah negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia yang dimotori diplomasi mahasiswa Indonesia di Timur tengah dan mendapat dukungan Luas dari Liga Arab sebelum akhirnya PBB mengakui kemerdekaan Indonesia pada 1948 .

Partai Keadlin Sejahtera (PKS) sebagai partai yang berasaskan Islam, kepengurusannya pada tingkat Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Syariah dan Majelis Pertimbangan Partai disisi personil yang secara aktif dan pasif sangat dekat dengan kawasan Timur tengah baik mereka yang pernah belajar disana sebagai mahasiswa ataupun pekerja formil ataupun non formil.

PKS juga didukung tokoh tokoh kawan kawan dekat M. Natsir, personil-personil ini didukung pemerintah Saudi Arabia, itu karena kedekatan Natsir dengan pemerintah Saudi Arabia, dan Natsir juga telah menerima penghargaan tertinggi Raja Saudi Arabia.

¹⁰ *Palestina info* diakses bulan April 2009

PKS adalah partai yang dalam kampanyenya sering menyuarakan isu-isu perjuangan kemerdekaan Palestina dan selalu bereaksi dengan fenomena standar Amerika terhadap bangsa Arab dan Palestina, reaksi itu terlihat dari demonstrasi dan pernyataan resmi partai juga pengiriman relawan ke Palestina.

Sikap-sikap PKS dalam negeri yang berideologikan Islam tidak bisa dipisahkan dari pengaruh ideologi Timur tengah dan itu terlihat kental dengan dalam sikap politik dan isu-isu yang diangkat kepermukaan.

Partai Politik Islam di Indonesia walau tidak bisa disebut sebagai perpanjangan tangan dari ideologi ideologi yang ada di Timur tengah sebagai akibat dari hubungan yang begitu intens antara dua kawasan yang berbudaya berbeda ini, namun kesamaan pemikiran dan pandangan serta isu internasional yang diangkat terlihat sama dan sangat kuat.

Hubungan antara Timur tengah dengan Indonesia dari beberapa aspek kehidupan terutama sosial dan politik memiliki kedekatan yang sangat historis, kedekatan hubungan antara dua kultur yang jauh berbeda ini kemudian melahirkan perubahan perubahan sosial dan politik di tengah masyarakat Indonesia.

Secara historis, vektor-vektor utama transmisi pemikiran timur tengah ke Asia Tenggara adalah gerakan sosial. Para pedagang dan ulama Arab berpergian ke kawasan ini selama paling tidak delapan abad, menyebarkan pengetahuan Islam dan berdakwah dikalangan non muslim. Dari pertengahan abad ke-19 ribuan orang Arab Yaman dari lembah Hadramaut menetap di Indonesia, memapankan diri sebagai Ulama, Guru dan Pedagang¹¹.

Kehidupan sosial politik timur tengah yang oleh kedekatan hubungan ini kemudian melahirkan pola perubahan sosial politik di Indonesia, salah satu sebab tertransferya kehidupan sosial politik timur tengah ke Indonesia karena banyaknya mahasiswa Indonesia yang menimba ilmu ke negara-negara Timur tengah ini, tentu dengan tanpa menafikan faktor lainnya juga, transfer pola pikir dan pengalaman politik di sana rupanya ingin dicoba untuk dipraktikkan di Indonesia.

¹¹Azzyumardi Azra, 2007, *Jaringan Ulama Timur Tengah di Indonesia abad 17 dan 18*, Mizan, Jakarta

Salah satu alasan yang dijadikan sebagai faktor utama mentransfer kehidupan sosial politik timur tengah ke indonesia ini adalah karena kebudayaan berbeda kemudian menjadi mirip disatu sisi, dan kesamaan nasib sebagai negara berkembang disisi lainnya.

Dua alasan inilah yang kemudian dibawa alumni-alumni Timur Tengah dan dipraktekannya transfer bidang sosial politik ini dalam berbagai kehidupan masyarakat indonesia mulai dari budaya, sosial dan Politik.

Di aspek budaya nuansa perubahan sosial di Indonesia terlihat secara kental dan kentara, perubahan yang terjadi dari pengaruh kehidupan sosial Timur Tengah terlihat dari penampilan fisik hingga model berpakaian yang mulai berubah.

Dan yang terpenting dari perubahan ini adalah terbentuknya pola pikir ala timur tengah yang dilakukan mahasiswa yang tengah belajar disana, mahasiswa yang belajar di Mesir maka pasti bersentuhan dengan pemikiran pemikiran Hasan Al Banna, Sayyid Qutub dan tokoh lainnya.

Di Saudi Arabia, Mahasiswa bersentuhan dengan pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab, Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah yang merupakan pilar pemikiran ulama Saudi Arabia, sementara di Yordania mahasiswa Indonesia berpetualang dengan pemikiran Taqiyuddin An Nabhani pendiri organisasi Internasional Hizbut Tahrir.

Di Qatar ada Yusuf Al Qordhawi seorang pemikir islam kontemporer dan menghiasi indonesia dengan buku buku nya yang telah diterjemahkan, dan di Kwait ada Jasim Al Muhalhil dan beberapa tokoh arab lainnya, di Lebanon ada pemikir Fathi Yakan dan sederetan nama intelektual arab lainnya, demikian juga di Iran ada Al Khumainy dan Ahmadi Nejad

Tokoh tokoh Timur tengah ini hampir keseluruhannya pernah terlibat mengambil peran dalam kehidupan politik dalam negeri, ada yang mengambil peran sebagai Oposisi atau juga sebagai partai pendukung pemerintahannya atau berkoalisi.

Ikhwanul Muslimun di Mesir adalah organisasi politik yang didirikan Hasan Al-Banna yang mengambil jalur Oposisi mulai dari pemerintahan Anwar Sadat, Jamal Abdul Nashir dan Husni Mubarak, mahasiswa Indonesia di Mesir banyak tertarik dengan tokoh perjuangan gerakan ini mulai dari Al Banna, Qutub maupun Yusuf Al-Qardhawi.

Ketertarikan mahasiswa Indonesia di Timur tengah kemudian mengilhami mereka untuk membuat kekuatan politik yang secara institusional mungkin tidak memiliki keterkaitan dengan organisasi induk di Timur tengah namun secara pemikiran dan pola pikir hampir dipastikan memiliki persamaan.

Partai Keadilan Sejahtera sejak berdirinya tidak luput dari adanya hubungan yang kuat antara gerakan Dakwah sosial Tarbiyah yang sebagian besar pemikirnya memiliki kesamaan pola pikir dengan Ikhwanul Muslimin dan Muhammad bin Abdil Wahhab.

Keterkaitan antara Timur tengah dan PKS di Indonesia ini kemudian menjadi dinamika tersendiri dalam sikap politik partai politik Islam Indonesia.

PKS misalnya mulai mengangkat tema-tema kemerdekaan Palestina sebagai jargon politiknya, partai politik islam lain juga juga mengangkat tema liberalisasi pemikiran Timur tengah, partai ini juga mengangkat tema kasus Hamas Fatah juga agresi militer Israel ke Gaza.

1.5. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan membahas tentang pengaruh ideologi Timur tengah terhadap PKS di Indonesia dan bagaimana sikap PKS dalam menghadapi pelbagai permasalahan bagsa yang muncul dan melihat solusi yang mereka tawarkan yang berawal dari ideologi mereka .

Dengan melihat latar belakang masalah dan pertanyaan penelitian yang ada maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab satu akan akan membahas Latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, sistematika penulisan, tujuan penelitian dan kerangka berfikir .

Bab dua akan membahas landasan teori penelitian yang mencakup Kerangka Konseptual, teori yang digunakan yaitu Teori Pengaruh, Teori Ideologi, Teori Perubahan, juga akan melakukan kajian atas Penelitian-penelitian Sebelumnya, diantaranya penelitian Jejak Kafilah, Jaringan Ulama Timur Tengah-Nusantara abad 17-18.

Dalam bab tiga akan mengulas tentang metodologi penelitian yang meliputi Ruang Lingkup Penelitian, Batasan Objek Masalah, Karakteristik Data, Paradigma Penelitian, Metode Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Unit Analisis Penelitian dan juga Metode Analisis Data .

Dalam Bab empat akan dilakukan kajian tentang pengaruh pemikiran dan ideologi Timur tengah di Indonesia dan Hubungan Pemikiran Indonesia dengan Timur Tengah, Tipologi Pengaruh Pemikiran Timur tengah dengan Indonesia, Penopong pemikiran Timur Tengah di Indonesia baik di Pesantren, Masjid ataupun Kampus, juga akan dibahas hubungan PKS dan Pemikiran Hasan Al-Banna. Bagaimana hubungan PKS dan ideologi IM bisa terbina dengan sangat baik atau hubungan antara keduanya hanya bersifat kebetulan semata?.

BAB II LANDASAN TEORI

1.1. Kerangka Konseptual

Teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini nanti adalah teori sebagai berikut :

1.1.1. Teori Kekuasaan

1.1.2. Teori Musyarakah Siyasiah

Teori Kekuasaan

Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain untuk mencapai sesuatu dengan cara yang diinginkan. Karena kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, maka setiap interaksi dan hubungan sosial dalam suatu organisasi melibatkan penggunaan kekuasaan¹².

Alan Ware menyebut bahwa partai politik yang kuat adalah partai politik yang memiliki sistem rekrutmen calon kepemimpinan yang kuat dan terukur dengan melibatkan struktur partai dari yang terendah hingga paling tinggi¹³

PKS adalah partai yang sistem rekrutmennya terbilang baik dan proses rekrutmen PKS adalah proses dimana dilakukan didalamnya penggemlengan kader untuk kemudian disiapkan menjadi calon calon pemimpin nasional .

Proses penyiapan atau dalam bahasa PKS kaderisasi adalah sistem yang digunakan oleh Hamas atau Ikhwanul Muslimin dalam merekrut kader-kader nya.

Proses kaderisasi untuk menyiapkan kepemimpinan nasional adalah salah satu cara menghimpun kekuatan yang dalam pemikiran PKS adalah cara terbaik saat ini untuk merebut kekuasaan dengan elegant.

Ibnu Khaldun¹⁴ seorang pemikir Timur Tengah menyebut Teori *Asabiyah* sebagai cara yang paling kuat untuk memperoleh kekuasaan dan cara yang digunakan nya adalah dengan menghimpun kader kader inti partai yang memiliki visi dan misi yang sama kuat yang akan membela kepentingan partai.

¹²Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, 2008, Gramedia, Jakarta

¹³ Alan Ware, *Political Party and Political System*, 1977, Oxfport.

¹⁴ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, 2000, Dar Jail Bairut.

Manusia mempunyai bermacam macam keinginan dan tujuan yang ingin sekali dicapainya. Untuk itu diasering merasa perlu untuk memaksakan kemauannya atas orang atau kelompok lain. Hal ini menimbulkan perasaan dalam dirinya bahwa mengendalikan orang lain adalah syarat mutlak untuk keselamatannya sendiri.¹⁵

Maka dari itu bagi orang banyak kekuasaan itu merupakan suatu nilai yang ingin dimilikinya kekuasaan sosial yerdapat dalam semua hubungan sosial dan dalam semua organisasi sosial. Kekuasaan sosial menurut Ossip K. Fletch Thein adalah keseluruhan dari kemampuan , hubungan-hubungan dan proses-proses yang menghasilkan ketaatan dari pihak lain, untuk tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan.¹⁶

Teori Musyarakah Siyasiah

Teori Musyarakah Siyasiah¹⁷ adalah teori yang digunakan Ikhwanul Muslimin dalam membenarkan partisipasi politik kelompok islam yang secara ideologi pemikiran berbeda dengan sistem yang dianut sebuah bangsa, seperti Indonesia sebuah negara yang islam bukanlah satu-satunya agama resminya.

Musyarakah Siyasiyah adalah partisipasi politik sebuah kelompok yang tidak memiliki ide dan sarana yang sama dengan mayoritas masyarakat muslim namun tetap digunakan karena memiliki landasan historis dengan realita sejarah para salaf Shalih dan para nabi nabi terdahulu

Tujuan dari musyarakah siyasiyah adalah menjamin kekuasaan berada ditangannya walau ideologi antar dua komunitas sangat bersebrangan dan tentunya dengan tidak meninggalkan ideologi dan ciri khas partai islam yang menerapkan islam sebagai prinsip bersikap dan berperilaku.

IM menganggap Musyarakah ini adalah sebuah pilihan alternatif ditengah tidak adanya pilihan-pilihan lain yang lebih memuaskan, pilihan musyarakah dipilih karena tetapnya sebuah ideologi berdiri dan selanjutnya mampu menekan atau melakukan bergaining terhadap pemerintahan yang berkuasa.

¹⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu Politik*, , 1977, Gramedia

¹⁶ ibid

¹⁷ Taufiq Yusuf Al Wa`I, *Al Fikr As Syiasy Ikhwanul muslimun*, 2001, Ar Risalah

Alasan yang digunakan IM dalam membenarkan musyarakah adalah kisah nabi Yusuf yang megajukan diri sebagai bendahara Mesir padahal Mesir saat itu bukan lah negara islam namun yusuf tetap menjabat jabatan tersebut dan mulai melakukan perbaikan dengan memanfaatkan jabatan yang diterimannya itu.

Najasyi juga salah satu raja yang menggunakan teori ini, walaupun ia berbeda dengan komunitas Habasy namun ia tetap memikul jabatan sebagai raja ditengah komunitasnya yang hampir semuanya adalah berfaham berbeda dengan nya.

Alasan ketiga musyarakah ini adalah karena kemashlahatan yang sangat besar jika negara mampu menjamin keberkangsungan daakwah dan negara tidak lagi bermusuhan dengan dakwah, karena alasan inilah musyarakah dianggap sebagai pilihan yang paling tepat guna keberlangsungan dakwah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pengantar

Dalam setiap penelitian ilmiah, maka sangat diperlukan adanya metodologi agar dapat mengarahkan peneliti atau penulis kepada tujuan dan target penelitian itu sendiri .

Sebagai kelaziman dalam kajian dan studi tentang masalah masalah sosial dan politik, maka pendekatan kualitatiflah pilihannya.

Penelitian dimaksudkan untuk mengkaji secara mendalam terhadap setiap masalah yang dilakukan dengan mengetahui dan memverifikasi berbagai teori atau konsep terdahulu agar dapat berguna bagi ilmu pengetahuan dan teknologi ¹⁸ .

Setiap penelitian kualitatif, maka diperlukan penentuan terhadap skala prioritas terhadap respon atau variabel yang ditentukan secara selektif, bukan didasarkan pada banyaknya jumlah yang akan diteliti.

Maka dalam penelitian sosial diperlukan salah satu pendekatan yaitu dengan mendapatkan data primer, skunder dan tertierinya.

Penelitian ini akan menfokuskan penelitiannya pada ada tidaknya pengaruh pemahaman ideologi Timur tengah terhadap partai politik Islam di Indonesia yaitu PKS .

Partai islam yang dimaksud disini adalah PKS, dan hal ini mendiskualifikasi PAN dan PKB dari partai politik Islam karena dalam AD ART nya tidak mencantumkan azas islam walau massa kedua partai ini adalah kalangan organisasi islam terbesar Indonesia demikian juga PPP dan PBB karena suaranya terus mengalami penurunan dari pemilu pemilu.

Karenanya berbagai data dan referensi yang berkaitan dengan objek penelitian yang ditentukan untuk ditelaah secara mendasar dan mendetail ¹⁹.

¹⁸M. Hasyim, *Metodologi Penelitian sosial*, PMB, LIPI,1999.

¹⁹ Anas Saidi, *Metodologi penelitian sosial*, LIPI 2001.

1.1. Ruang Lingkup Penelitian

1.1.1. Batasan Objek Masalah

Penelitian ini akan membatasi ruang lingkup permasalahannya pada pengaruh Ideologi Timur tengah pada partai politik Islam di Indonesia dengan menjadikan PKS sebagai objek kasus yang akan di teliti.

PKS adalah Partai islam yang ditandai dengan pencantuman azasnya dalam anggaran dasar rumah tangganya, tidak seperti PAN dan PKB yang merupakan partai politik terbuka dengan azas nasionalis namun massa nya berasal dari kalangan muslim moderen atau tradisional.

PAN dan PKB tidak akan menjadi objek dalam penelitian, namun penelitian ini akan memfokuskan kajiannya pada PKS semata yang secara tegas menyebut partainya sebagai partai yang berazaskan islam dan menjadi partai islam yang masuk dalam big four party.

1.1.2. Karakteristik Data

Menurut Lofland dan Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain lain ²⁰. Sementara Robert K.Yin menegaskan ada enam sumber bukti atau sumber data yang dapat diperoleh dari penelitian studi kasus. Keenam sumber bukti yang dapat dijadikan fokus bagi pengumpulan data studi kasus adalah dokumen, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi pemeran serta dan penrangkat fisik ²¹.

Karakteristik yang ada dalam penelitian ini meliputi data kasus dimana peneliti berusaha semaksimal mungkin mendapatkan data kasus terkait pengaruh ideologi Timur tengah terhadap kebijakan politik PKS di indonesia. Data kasus yng mayoritas didapatkan adalah data data dokumen yang tersebar dalam berbagai literatur baik buku ataupun media elektronik.

Data dokumen dalam penelitian ini meliputi data kasus dimana peneliti berusaha semaksimal mungkin mendapatkan data kasus terkait pengaruh ideologi Timur tengah

²⁰Lofland, Jhon H. Lofland, *Analyzing social setting* dikutip dari Lexi J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT Remaja rosdakarya, Bandung 2006 hal 157.

²¹Robert K. Yin, *Studi Kasus, desain dan metode*, PT Raja Grafindopersada, jakrta, 2004, hal. 103

terhadap kebijakan PKS di Indonesia, data kasus yang mayoritas peneliti dapatkan lebih kepada dokumen eksternal, dimana dokumen eksternal ini berisi bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial misalnya majalah, bulletin, jurnal, dan berita yang disiarkan ke media massa. Dokumen eksternal dapat dimanfaatkan untuk menelaah konteks sosial, kepemimpinan dan lain lain ²²

1.2. Paradigma Penelitian

Paradigma menurut para ilmuwan berfungsi untuk menentukan masalah-masalah mana yang penting untuk diteliti, menunjukkan cara bagaimana masalah itu harus dikonseptualisasikan, metode apa yang cocok untuk menelitinya dan bagaimana cara menginterpretasikan hasil penelitian. Paradigma dapat diartikan sebagai aliran pemikiran yang dapat memiliki kesamaan asumsi dasar tentang suatu bidang studi termasuk kesepakatan tentang kerangka konseptual, petunjuk metodologis dan teknik analisis ²³.

Terdapat tiga paradigma yang berkembang dalam kegiatan penelitian yaitu paradigma positivisme, paradigma konstruktivisme dan paradigma kritikal teori.²⁴

Paradigma penelitian yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah paradigma konstruktivisme serta metodologi penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Sebab penulis memiliki alasan dan tujuan penelitian yang sesuai dengan kasus yang akan diteliti, penelitian ini akan berupaya memahami dan mendalami proses pengaruh ideologi Timur tengah terhadap kebijakan PKS di Indonesia, yaitu memperdalam kasus kebijakan PKS yang dipengaruhi oleh ideologi Timur tengah.

²² Lexi j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, 2006, Bandung hal 219.

²³ Mas' oed Mukhtar, *Ilmu Hubungan Internasional, disiplin dan metodologi*, 1990, Op.cit hal. 8

²⁴ ibid hal 71.

1.3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang dipergunakan adalah studi kasus (*case study*). Metode studi kasus adalah suatu pendekatan mempelajari, menerangkan dan menginterpretasi suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa ada intervensi dari pihak luar²⁵.

Metode penelitian studi kasus mempunyai manfaat menjelaskan hubungan sebab akibat dalam hubungan nyata menggambarkan sebuah konteks kehidupan evaluasi dan eksplorasi.

Inti studi kasus yaitu kecenderungan utama dari semua ragam studi kasus adalah bahwa studi kasus ini berusaha untuk menyoroti suatu keputusan, mengapa keputusan itu diambil bagaimana diterapkan, dan apakah hasilnya, metode studi kasus pada dasarnya terfokus pada dua alasan :

1. Studi kasus merupakan suatu metode penelitian kualitatif yang muncul pada masa keemasan penelitian kualitatif yang sifatnya spesifik khusus dan beskala lokal.
2. Studi kasus banyak digunakan dalam penelitian pendidikan yang mendapat perhatian dari para pemerhati, praktisi dan peneliti pendidikan pembahasan metode studi kasus diarahkan pada konsep dasar, metodologi dan proses studi, kelebihan dan kekurangannya begitu juga halnya jika diterapkan dalam bidang sosial politik dalam suatu negara .

Selain itu, metode studi kasus dapat digunakan apabila memenuhi unsur sebagai berikut :

- a. Bila peneliti memiliki informasi yang tidak sedikit tentang hal yang diteliti
- b. Bila fokus penelitiannya adalah fenomena yang sedang berlangsung
- c. Bila ada banyak sumber data²⁶

²⁵ Robert K. Yin Op.cit hal 92-93

²⁶ ibid

Kasus pengaruh ideologi Timur tengah terhadap kebijakan partai politik Islam PKS di Indonesia dan bagaimana keputusan partai politik Islam dipengaruhi oleh ideologi Timur tengah adalah kasus yang telah memenuhi unsur yang terdapat dalam unsur-unsur penelitian metode studi kasus .

Pengaruh ideologi Timur tengah ini terlihat dari sikap dan kebijakan partai politik PKS terhadap penerapan syariat Islam di beberapa daerah yang diatur dalam bentuk perda-perda.

1.4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang bisa dilakukan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, dalam artian bahwa diperlukan selain pengamatan dan penelaahan secara sistematis terhadap data-data primer dan sekunder. Yang menyangkut terdapat beberapa jenis dokumen yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penelitian yaitu :

- Surat, memorandum, dan pengumuman resmi
- Agenda, kesimpulan pertemuan dan laporan peristiwa tertulis lainnya
- Dokumen administratif-proposal, laporan kemajuan dan dokumen-dokumen lain
- Penelitian dan evaluasi resmi pada situs yang sama
- Kliping baru dan artikel lain yang muncul di media massa

Karena nilainya secara keseluruhan, dokumen memainkan peran yang sangat penting dalam pengumpulan data studi kasus. Penelusuran yang sistematis terhadap dokumen yang relevan karenanya penting sekali pengumpulan data .

Untuk mempertahankan objektivitas bahasan dari data yang didapat dalam penulisan ini penulis sangat hati-hati dalam pengambilan dokumen terutama terkait dengan tidak terlepasnya pengaruh intervensi orang atau organisasi atau aktor lainnya yang dengan sengaja merubah dokumen demi kepentingannya sehingga validitas dokumen tidak lagi dapat dipertahankan.

Untuk studi kasus, penggunaan dokumen yang paling penting adalah pendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain. Pertama, dokumen membantu

pemverivikasian ejaan dan judul atau nama yang benar dan organisasi yang telah disiinggung dalam wawancara. Kedua, dokumen dapat menambah rincian spesifik lainnya guna mendukung informasi dari sumber sember lain; jika bukti dokumenter bertentangan dan bukannya mendukungnya, peneliti mempunyai alasan untuk meneliti lebih jauh topik yang bersangkutan . ketiga, ininferensi dapat dibuat dari dokumen dokumen sebagai contoh, dengan mengobservasi pola tembosan karbon dari dokumen tertentu ²⁷.

Karena nilainya secara keseluruhan, dokumen memainkan peran yang sangat penting dalam pengumpulan data studi kasus.penelusuran yang sistimatis terhadap dokumen yang relevan karenanya penting sekali bagi pengumpulan data.

Dalam wawancara terstruktur bahan bahan wawancara dipersiapkan secara ketat. Sebaiknya, wawancara tak terstruktur menghindari ketatnya struktur bahan. Selain kedua jenis wawancara diatas, belakangan muncul pula model wawancara kelompok (*group interview*) yang kemudian melahirkan model pengambilan data dengan teknis fokus group discusion. Jenis terakhir ini merupakan perangkat wawancara yang dilakukan secara simultan terhadap sejumlah individu, baik dalam situasi formal maupun informal .²⁸

Penelitian ini akan melibatkan secara aktif salah seorang mahasiswa Al Alazhar Indonesia dalam membantu proses pengumpulan dan menganalisanya .

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan April hingga Juni 2010 dengan melakukan analisa data dan wawancara terstruktur dari imforan imforan yang dibutuhkan.

²⁷ ibid.hal 104

²⁸ Andrea Fontana dan James H Frey

1.5. Unit Analisis Penelitian

Bagaimana ideologi Timur tengah mempengaruhi kebijakan partai politik islam PKS di Indonesia, berikut adalah kerangka unit analisa yang dimaksud :

Objek Kasus	Partai Politik Islam PKS di Indonesia dan jaringan Ideologi Timur tengah
Unit Analisis	<ol style="list-style-type: none">1. Tokoh-tokoh partai politik Islam PKS Indonesia yang memiliki hubungan dengan pemikiran Timur tengah2. Kebijakan kebijakan partai politik islam PKS yang dilakukan atas pengaruh ideologi Timur tengah3. Bagaimana prediksi Partai politik Islam PKS di Indonesia pada 2014
Sub Unit Analisis	<ol style="list-style-type: none">1. Perkembangan pemikiran tradisional dan moderen Timur tengah di Indonesia2. Pengaruh perkembangan pemikiran tersebut dalam partai politik islam PKS di Indonesia3. Sikap partai politik islam PKS terhadap pendirian Syariat islam4. Sikap partai politi Islam PKS terhadap khilafah islamiyah5. Sikap partai politik Islam PKS indonesia terhadap ideologi pancasila sebagai azas negara6. Target target partai politik islam PKS di pemilu 2014

1.2. Metode Analisis Data

Menurut Bogdan dan Bikland 1982 analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesakannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan dari orang lain. Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya penulis melakukan analisis berdasarkan kerangka pemikiran yang terdapat dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif analitis. Di pihak lain, analisis data kualitatif (Shiddell, 1998) prosesnya berjalan sebagai berikut :

- a. Mencatat dan menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya agar dapat tetap ditelusuri
- b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesis, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya,
- c. Berfikir, dengan jalan membuat prediksi agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan dan membuat temuan-temuan umum .

BAB IV :
PENGARUH IDEOLOGI TIMUR TENGAH TERHADAP
KEPUTUSAN-KEPUTUSAN POLITIK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

1.1. Ideologi-ideologi Timur Tengah dan hubungannya dengan PKS

• **SYIAH**

Faham Syiah adalah faham yang muncul pada masa pemerintahan islam (*Khilafah Islamiyah*) Ali bin Abi Thalib²⁹, faham ini sekarang sekarang banyak berkembang diIran sekaligus menjadikan negaranya sebagai pemeluk mazhab resminya, saat ini Syiah menjadi faham kedua didunia islam tersebar diseluruh dunia dengan presentasi sekitar 10 persen dari pemeluk sunni.

Di Indonesia faham ini tidak begitu populer karena pengaruh Sunni yang begitu sangat kuat terutama Mazhab Syafi'i³⁰ dikarenakan banyaknya mahasiswa dan cendikiawan Indonesia yang belajar di negara-negara mayoritas Sunni, adapun di Iran mahasiswa Indonesia tidak sebanyak mahasiswa dinegara-negara Sunni, beberapa alumni Iran mengatakan jumlah mahasiswa Indonesia di Iran sekitar 300 mahasiswa saja.

Namun perlahan faham Syiah mulai mendapat tempat dihati kaum muslimin di Indonesia, itu ditandai dengan banyaknya mahasiswa Indonesia yang mulai mendapat beasiswa belajar kesana seperti di kota Qum³¹.

Disamping itu juga, atase kebudayaan Iran di Indonesia juga sangat gencar menyebarkan ideologi Syiah pada komunitas Indonesia terutama diperguruan tinggi Indonesia, dan beberapa pesantren Syiah di beberapa kota di Indonesiapun sudah mulai berdiri seperti di Pekalongan, Bandung, Depok dan beberapa kota lainnya, ritual-ritual Syiah juga sudah mulai terang-terangan dilakukan di Indonesia seperti perayaan hari Karbala dan perayaan lainnya.

²⁹ Syahrastani, *Al-Milal wan Nihal*, 2000, Dar Fikr, Bairut, faham ini menganggap bahwa sepeninggalan Nabi Muhammad maka Ali bin Abi Thaliblah yang berhak menjadi pemimpin dunia Islam (Khalifah) dan orang-orang yang tidak menganggap musuh Ali sebagai Musuh adalah orang yang keluar dari fahamnya seperti Mu'awiyah, Aisyah dan sahabat lainnya seperti Abu Bakar dan Umar atau Utsman.

³⁰ Imam Syafi'i memiliki penganut sekitar 28% muslim di dunia. Pengikutnya tersebar terutama di Indonesia, Turki, Irak, Syria, Iran, Mesir, Somalia, Yaman, Thailand, Singapura, Filipina, Sri Lanka dan menjadi mazhab resmi negara Malaysia dan Brunei

³¹ Beberapa mahasiswa yang belajar disana mengatakan bahwa jumlah pelajar Indonesia dikota Qum saja berjumlah sekitar 200 an lebih.

PKS tidak memiliki hubungan dengan ideologi Syiah, ini karena PKS menganggap dirinya penganut faham *Ahlus Sunnah wal Jamaah (Sunni)* bahkan para tokohnya banyak yang menolak atau bahkan menyerang kelompok ini, seperti pada tahun 1998 Hidayat Nur Wahid bersama alumni Timur tengah lainnya mengadakan seminar nasional yang berjudul kenapa kami menolak Syiah.

Sikap PKS yang menolak Syiah sebenarnya lebih pada karena mayoritas tokoh PKS kebanyakan menuntut ilmu dan belajar dinegara-negara berfaham Sunni yang secara geopolitik negara-negara Timur tengah ini memiliki persaingan ditingkat regionalnya, seperti Saudi Arabia dan Iran yang secara Geopolitik memang terlibat dalam peperangan perebutan pengaruh di Timur tengah dan isu agama terutama isu syiah adalah isu yang sangat tepat untuk menghantam komunitas Syiah dari Timur tengah dan itu terbukti sangat efektif didunia Islam.

- **WAHABI**

Wahabi dinisbahkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab seorang penasihat spiritual Muhammad bin Saud pendiri pertama Kerajaan Saudi Arabia, Abdul Wahhab adalah seorang ulama yang begitu konsisten terhadap pembersihan akidah masyarakat Saudi saat itu dan karena kekonsistennya ini banyak yang tidak suka dan Apriori dengan dakwahnya.

Apalagi kemudian Ia mampu menyakinkan raja Saudi untuk memasuki dunia politik praktis dan menjadikan fahamnya sebagai faham resmi negaranya. Menyebabkan banyak tokoh politik yang tersisihkan seperti Syarif Husin yang merupakan perwakilan resmi khalifah Utsmani di Mesir yang hingga kini kenangan itu masih membekas di rakyat Mesir dan Saudi ³²

Untuk menjamin dakwah wahabi ini tetap bertahan di semenanjung arab maka iapun mendekati pendiri kerajaan Saudi arabia meminta jaminan keberlangsungan dakwahnya, akhirnya mereka berdua sepakat untuk berbaiat sumpah setia, raja menjamin dakwah dan ulama tak akan mengambil kekuasaan raja ³³.

Abdul Wahhab adalah pengikut mazhab Hanbali yang sekarang Saudi Arabia menggunakannya sebagai mazhab resmi kerajaan, salah satu ciri mazhab ini adalah

³² Banyak orang-orang Saudi yang tak suka orang Mesir atau sebaliknya orang Mesir membenci orang Saudi karena masing masing melihat sejarah dari arah yang berbeda-beda.

³³ Utsaimin, *Dakwah Wahabiyah Dakwah Islahiyah*, 2000, Riyadh, Saudi Arabia

kuatnya terhadap pemahaman tekstual hadist, karenanya jika ada pendapat yang bertentangan dengan tekstual hadist yang diyakininya itu maka ia akan segera memvonis lawannya dengan sesat atau vonis lainnya yang kadang menyebabkan terjadi kesalah fahaman antara kelompok islam ini dengan kelompok-kelompok islam lainnya.

Atas dasar sejarah inilah Saudi Arabia memiliki dua pusat kekuasaan, pertama adalah raja dan keturunannya yang akan mengurus masalah politik dan sistem pemerintahan dan kedua adalah ulama yang mengurus masalah agama dan sosial masyarakat, walau dalam beberapa kesempatan ulama terkadang mengalah dari kekuasaan raja, seperti yang terlihat pada fatwa bolehnya tentara AS menjadikan pangkalan Saudi Arabia sebagai pangkalan militernya untuk menyerbu Irak, fatwa ini kemudian mendapat pertentangan keras dari semua ulama dunia³⁴.

Di Indonesia kelompok ini lebih dikenal dengan kelompok salafi yang keberlangsungan organisasinya sangat mengendalikan dana dari Saudi Arabia, kelompok ini secara politik tidak berafiliasi ke PKS bahkan menganggap PKS adalah kelompok berbahaya yang terkadang terlibat dalam perdebatan masalah agama dengannya.

Kelompok Salafi ini mendirikan banyak yayasan-yayasan sosial dan dakwah yang menyebarlusakan fahamnya secara gradual, mislnya berdirilah di Jakarta Lembaga Dakwah dan Taklim, As Shofwah di Lenteng Agung dan lembaga-lembaga pendidikan yang pendanaannya sangat kuat berasal dari Saudi Arabia di beberapa kota lainnya di Indonesia.

- **IKHWANUL MUSLIMIN (IM)**

Ikhwanul Muslimun adalah sebuah kelompok islam yang didirikan seorang tokoh islam bernama Hasan Al-Banna pada tahun 1925 di Mesir yang konsentrasi dakwahnya ada pada slogan menjadikan islam sebagai solusi hidup masyarakat.

IM adalah kelompok yang penyebarannya sangat agresif ditandai dengan hampir disemua negara islam ada cabangnya yang berdiri, Qordhowi menyebut bahwa

³⁴ Fatwa bin Baaz ketua Ulama Saudi Arabia yang memberikan fatwa bolehnya tentara AS menjadikan pangkalan Saudi sebagai basis pangkalan militer untuk menyerang Saudi Arabia.

penyebaran kelompok ini sudah tersebar di 80 negara-negara islam dengan berbagai pola nama dan organisasi ³⁵.

Simbol organisasi ini adalah dua pedang yang melingkari Al-Quran dan memiliki pedoman serta misi yang berbunyi Allah Tujuanku, Rasul Tauladanku, Al-Qur`an pedoman hidupku, Jihad jalan hidupku, Mati Syahid adalah cita-cita tertinggi. Lima prinsip ini adalah simbol baku organisasi islam ini secara Internasional .

Jika melihat prinsip yang ada pada PKS dan yang ada pada IM maka kedua organisasi ini memiliki kesamaan prinsip dan semboyan dan juga seruan yang disuarakan juga hampir mirip sama, seperti slogan islam adalah solusi dan juga masalah-masalah internasional lainnya yang mereka suarakan namun memang secara organisasi tidak memiliki hubungan yang verbal seperti pernyataan Ali Ahmadi dan Budianto petinggi PKS saat Tim melakukan wawancara dengan mereka beberapa waktu lalu di Jakarta .

1.2. Indonesia dan Pengaruh Pemikiran Timur tengah

Indonesia adalah ladang subur tempat berkembangnya semua pemikiran dan ideologi Timur tengah, fenomena itu terlihat dari berdirinya banyak yayasan atau lembaga yang beraliran ketimur tengahan ditanah Nusantara ini.

Pengaruh pemikiran Timur tengah di Indonesia mengalami beberapa tipologi yang sangat unik, keaneka ragaman tipologi ini sangat terkait dengan tipikal negara negara Timur tengah yang sangat banyak corak dan ragam ideologi yang berkembang disana dan keragaman ideologi Timur tengah itu mempengaruhi pembawa pemikiran Timur tengah di Indonesia ada yang keras, moderat dan juga sekuler.

Di Timur tengah ada gaya kepemimpinan otoliter kerajaan seperti Kerajaan Saudi Arabia, negara Kwait dan umumnya negara negara Teluk, juga ada negara Demokrasi namun sangat mengekang kebebasan seperti Mesir, namun disisi lain sangat berkembang pemikiran partai oposisi penentang partai yang sedang berkuasa yang diorganisir oleh kelompok Ikhwanul Muslimun.

Ada juga corak Lebanon yang sepertinya agak mirip dengan model Indonesia yang mentolerir semua ideologi baik islam ataupun ideologi lainnya seperti Bhinika

³⁵ Yusuf Al Qardhawi, *Fikih Daulah*, 1998, Dar Risalah, Mesir

Tunggal Ika. Orang Lebanon memiliki Watsiqah Thaif yang merupakan alat pemersatu semua ideologi dan agama yang berkembang disana.

Karenanya tak mudah menyimpulkan satu ideologi Timur tengah yang menguasai sosial politik masyarakat Indonesia karena bercampur baurnya para alumni Timur tengah di Indonesia, alumni saudi membawa ajaran Wahabi, alumni Mesir membawa IM, alumni Lebanon membawa faham pluralisme dan bermacam aliran Timur tengah lainnya.

Oleh sebab itu Indonesia adalah lahan subur tempat berkembangnya ideologi Timur tengah di Indonesia yang jika faham-faham ini tidak segera mengikuti Nation Building Indonesia maka beragam ideologi timur tengah ini akan menjadi ancaman serius kebinikeaan Indonesia.

Indonesia harus segera mengambil satu ideologi agar benturan-benturan faham ini tidak mengganggu stabilitas politik dalam negeri Indonesia sebab jika tidak segera mengambil keputusan ini maka penyebaran beragam faham ini akan menjadi bola salju menggelinding yang siap menghancurkan stabilitas dalam negeri dan pembangunan politik dalam negeri indonesia ³⁶ sebab syarat pertumbuhan ekonomi yang baik adalah terwujudnya stabilitas politik dalam negeri³⁷.

1.3. Penopong pemikiran Timur Tengah di Indonesia

1.3.1. PONDOK PESANTREN

Pondok pesantren adalah tempat suburnya faham ideologi Timur tengah berkembang pesat, pondok pesantren adalah lembaga pendidikan agama formal yang mengajarkan ilmu-ilmu islam kepada santri-santrinya.

Para pendidik pondok pesantren umumnya berasal dari alumni-alumninya yang telah menyelesaikan pendidikan formalnya baik didalam ataupun diluar negeri, namun alumni pondok pesanteren jika keluar negeri untuk belajar ilmu pengetahuan islam maka selalu pergi menuju Timur tengah sebagai rujukan utamanya, terutama Negara-negara

³⁶ Juowono Sudarsono, *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik*, Gramedia, Jakarta, 1976.

³⁷ Lihat sepuluh aspek pembangunan politik Lucian Pye dalam Juowono Sudarsono, *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik*, Gramedia, Jakarta, 1976.

yang banyak menyediakan beasiswa dengan jumlah yang lumayan banyak seperti Saudi Arabia, Mesir, Kuwait ataupun Qatar³⁸.

Para penerima beasiswa umumnya berasal dari pondok pondok pesantren yang memiliki hubungan ketokohan, ide ataupun pemahaman yang sama dengan Negara-negara yang mengeluarkan beasiswa, Universitas-universitas di Saudi misalnya mensyaratkan penerima beasiswa harus memegang dua rekomendasi tokoh-tokoh yang dikenal Negara Saudi atau yang memiliki keahlian dan riwayat membela kepentingan, ajaran dan faham Saudi Arabia di Indonesia.

PKS memiliki basis pondok pesantren karena sebagian besar pendiri partai ini adalah alumni-alumni Timur tengah yang pernah mengenyam pendidikan agama di Negara padang pasir. Pondok pesantren Khusnul Khatimah yang terletak di Kuningan Jawa Barat adalah salah satu pondok pesantren yang menjadi basis partai Keadilan Sejahtera yang hampir sebagian besar tenaga pendidiknya adalah alumni Timur tengah.

Pondok Pesantren Rafah yang terletak diBogor juga contoh lain dari basis PKS di Pondok pesanteren, pesantren pimpinan Nasir Zen ini juga merupakan tokoh PKS yang menjadi pendiri Partai Keadlian pada 1999 dulu sebelum berubah menjadi PKS.

1.3.2. MASJID

Bagi penyebar ideologi Timur tengah, Masjid adalah tempat yang paling netral untuk menyebar luaskan faham Timur tengah, itu karena Masjid adalah tempat terstrategi dan teraman serta ternetral untuk menyebarluaskan ideologi ini.

Masjid dianggap sebagai tempat berkumpulnya semua ummat islam dan tak mengenal batas-batas aliran faham politik dan faham lainnya, karenanya masjid kemudian menjadi arena rekrutmen partai politik salah satunya adalah PKS.

PKS dengan bermodalkan alumni sarjana Timur tengah yang menguasai ilmu agama secara baik selalu membidik masjid sebagai tempat rekrutmen, jamaah masjid

³⁸ . Satu Universitas di Saudi bisa menyediakan puluhan beasiswa khusus Indonesia, mislanya Islamic University yang terletak di kota Madinah menyediakan lebih dari 30 beasiswa bersih bahkan mendapat tunjangan biaya hidup 800 real/bulan, belum lagi universitas atau negara lainnya seperti Ummul Qura, Imam University. Mesir ,Yordania, Marokko dll.

secara berkala dikunjungi dan menjadwalkan kajian-kajian islam yang kemudian secara sistematis dan gradual membentuk para pengikutnya mau dengan sukarela dan semangat mengikuti partai politik yang diyakininya.

Masuknya PKS dimasjid-masjid dan kemudian mulai menguasai aktivitas masjid menyebabkan ketua Muhammadiyah dan NU Din Syamsuddin dan Hasyim Muzadi mengeluarkan keputusan resmi yang melarang kegiatan politik didalam masji-masjid Muhammadiyah atau NU dan mengingatkan jamaahnya agar berhati hati dengan mulai masuknya PKS kedalam masjid NU atau Muhammadiyah³⁹.

1.3.3. KAMPUS

PKS memasuki kampus melalui pendekatan LDK-LDK (Lembaga Dakwah Kampus) yang ada, PKS secara rutin mengadakan rekrutmen oleh senior-senior kampus yang memang secara pemikiran telah terpengaruhi ide-ide PKS, kegiatan-kegiatan ini secara berkala kemudian membuat pola rekrutmen politik secara massif dan gradual.

Jika kader LDK telah matang secara ilmu agama dan politik maka mereka akan digiring masuk organisasi KAMMI yang merupakan organisasi mahasiswa yang secara nyata banyak mendukung sikap politik PKS yang dilakukan melalui demonstrasi-demonstrasi nyata di lapangan.

Kampus adalah lapangan rekrutmen luas yang dijadikan PKS sebagai ajang rekrutmen kader-kadernya secara militant dan kuat sehingga memang dilapangan terlihat mahasiswa mahasiswa berideologikan PKS begitu kuat dengan prinsipnya yang memang telah dibentuk untuk menjadi kader-kader partai yang handal dengan serangkaian latihan dan ujian-ujian kompetisi.

1.4. PKS dan Pemikiran Hasan Al-Banna (Ikhwanul Muslimin)

Hasan Al-Banna adalah pendiri organisasi islam terbesar didunia saat ini, Ikhwanul Muslimin yang merupakan organisasi yang sangat agresif dan paling banyak memiliki

³⁹ Ilusi Negara Islam, LibForAll Foundation, 2009, Desantara Utama Media, Jakarta

kader diseluruh Mesir serta juga dunia islam. Organisasi ini Al Banna dirikan pada tahu 1928 di Mesir.

PKS secara instutusi dan strukrural organisasi memang tidak memiliki hubungan dengan organisasi ini namun secara pemikiran sangat kental dan terbaca adanya pemikiran Ikhwanul Muslimun dalam partai politik ini.

Jika melihat AD/ART Ikhwanul muslimin maka organisasi ini secara nyata memang mengakui akan adanya cabang-cabang mereka di seluruh dunia dengan menggunakan nama Ikhwanul Muslimin seperti di Yordania, Lebanon ataupun di beberapa negara Timur tengah lainnya.

Dalam peraturan IM kepengurusan cabang Internasional disusun atas usulan dan keputusan cabang setempat, pusat hanya memberikaan arahan-arahan struktural terkait kebijakan jangka panjang, karenanya cabang memiliki otonomi khusus yang sangat luas dalam menentukan sikap dan kebijakan jangka pendek, cabang harus memikul kewajiban menyebarluaskan visi misi IM ke seluruh anggotanya secara masif dan teratur⁴⁰, karenanya setiap buku best seller timur tengah terutama yang ditulis anggota DPP IM pasti akan diterjemahkan secara cepat di Indonesia. Seperti karangan Qardhawi dan tokoh IM lainnya.

Karenanya secara pemikiran dan misi IM dan PKS begitu dekat dan seolah mirip atau bahkan sama dan diwebsite resmi IM PKS disebut sebagai cabang IM yang ada di Indonesia padahal ada organisai di Indonesia menggunakan nama IM yang dipimpin oleh salah seorang Habib namun IM pusat tak mengakuinya sebagaai cabang resmi IM di Indonesia ⁴¹.

Fakta-fakta inilah yang menguatkan bahwa IM dan PKS memiliki persamaan yang sangat nyata dan terbukti dengan isu-isu yang diangkat IM dan PKS yang juga hampir sama, diantaranya adalah kemerdekaan Palestina dan juga isu Islam sebagai Solusi bernegara dan berbangsa.⁴²

⁴⁰ Diantara visi misi IM adalah : Allah Tujuanku, Muhammad Suri Tauladanku, Al-Quran pedoman Hidupku dan mati dijalan Allah adalah cita-citaku tertnggi, ada 3 syarat bergabung mwenjadi anggota im internasional salah satunya adalah memiliki tanda pengakuan yg dikeluarkan mursyid amIM.

⁴¹ Lihat dilampiran contoh pengakuan IM pusat terhadap PKS sebagai cabanagnya di Indonesia.

⁴² Lihat ikhwanonline.com di bagian kabar anggota yang mengatakan PKS adalah salah satu cabang IM yang berpusat di Mesir.

Karenannya isu yang diangkat oleh IM di Mesir selalu menjadi isu utama juga di PKS sebagai pertanda akan adanya hubungan yang sangat kuat antara IM dan PKS secara pemikiran walau memang secara organisasi hubungan itu tak terbukti.

Fakta ketidak ada hubungan antara PKS dan IM ini terlihat dari hasil wawancara Tim peneliti Al Azhar dengan tokoh tokoh PKS seperti Ali Ahmadi dan Budianto Ketua hubungan luar negeri PKS yang mengatakan jika ada isu yang diangkat PKS dan memiliki kemiripan dengan isu yang diangkat IM maka itu tidaklah menjadikan PKS adalah bagian dari IM, kemiripan yang ada adalah karena memang muslim dimanapun berada satu bagian tubuh yang tak mungkin bisa terpisahkan.

Isu Palestina menjadi isu nasional juga merupakan kebijakan politik PKS yang melakukan kontrak politik dengan SBY, padahal Palestina dengan Indonesia berjarak sangat jauh, namun Budianto mengatakan bahwa sikap PKS itu adalah sikap muslim yang melihat saudaranya tertindas dibelahan bumi lainnya dan itulah solidaritas yang harus dimiliki setiap muslim.

Walau kesamaan isu yang diangkat kedua organisasi ini hampir mirip namun secara organisasi memang tak ada bukti faktual akan adanya hubungan internasional dua organisasi ini namun kesamaan-kesamaan ini menyisakan banyak pertanyaan akan masa depan PKS yang tidak terus terang dengan ideologi yang ingin dikembangkan di Indonesia. Dan inilah yang kemudian menjadi tanda tanya partai politik lain terhadap sikap ketidak terus terang PKS ini.

1.5. Sikap PKS terhadap azas partai politik

IM adalah organisasi yang secara keras menolak asas lain sebagai asas berbangsa dan bernegara, menurut organisasi ini Al-Quran dan Sunnah atau Islam adalah landasan organisasi dalam mengambil setiap kebijakan yang terkait dengan berbangsa dan bernegara⁴³.

Menurut IM tak akan ada ideologi yang bisa bertahan lama selain ideologi Islam. Komunis, Sosialis dan semua ideologi lainnya tak akan mampu bertahan sebagaimana ideologi Islam mampu bertahan seperti yang terlihat saat ini, seberat apapun cobaan yang

⁴³ Yusuf Al Wa`iy, Fikr Syiasy Ikhwanul Muslimin, 2000, Dar Risalah, Mesir

dihadapi islam, semua itu tak membuat ideologi ini mati, malah bahkan justru sebaliknya semakin ditekan ideologi ini semakin menguat, karenanya Al-Quran dan Islam adalah keputusan final IM, IM kemudian terkenal dengan simbolnya *Al Islam Hual Hill* (Islam adalah Solusi kehidupan)

Sikap PKS hampir sama dengan sikap IM begitu sangat kuat dengan penggunaan ideologi Islam dan menganggap bahwa islam adalah final dan tidak lagi mengkotak kotakkan antara nasionalisme dan islam karena dua kata ini bagi PKS adalah dua istilah yang bisa berjalan beriringan, serta semangat mengkotak-kotakkan dua istilah ini hanya untuk tujuan politik sesaat yang harus ditinggalkan.

PKS dalam AD ART nya menyebut Islam adalah Asas partai walau tetap mengakui Pancasila dan UUD 1945 namun tidak mau meninggalkan asas Islam sebagai simbol berbangsa bernegara sebuah sikap yang begitu kuat sama seperti yang tunjukkan IM di Mesir⁴⁴.

Kesamaan kedua sikap antara IM dan PKS ini kemudian ketika Tim melakukan wawancara juga menyimpulkan hasil wawancara yang sama yaitu dua sikap ini tidaklah menjadikan IM dan PKS adalah satu organisasi yang sama dibawah satu komando internasional, semua sikap dan keputusan PKS ini adalah hanya kebetulan semata dan tak memiliki variabel apapun bagi dua organisasi ini.

1.6. Sikap PKS terhadap penerapan Syariat Islam di Indonesia

Seorang peneliti asing Willian R Liddle mengatakan bahwa Indonesia ketika keran perpolitikan dalam negerinya sudah mulai terbuka maka gerakan Islam akan lebih bersifat Skripturalis ⁴⁵ penerapan Syariat islam akan terjadi menjadi lebih masif serta lebih agresif, kenyataan serta fenomena dari teori Liddle itu terlihat dari pemberlakuan Aceh hukum islam sebagai hukum bermasyarakat daerahnya.

⁴⁴ Lihat AD/ART PKS 2007

⁴⁵

William R. Liddle, "Media Dakwah Scripturalism: One Form of Islamic Political Thought and Action in New Order Indonesia", dalam *Toward a New Paradigm: Recent Development in Indonesian Islamic Thought*, Mark R Woodward (ed) (Arizona: Arizona State University, 1996), 323-56

Setelah Aceh memberlakukan formalisasi hukum islam maka puluhan daerah juga mulai mencoba melakukan perubahan undang-undang daerahnya dengan mengakomodasi formalisasi syariat Islam, maka tuntutan pemberlakuan hukum islam di Jawa, Sumatera dan juga Sulawesi menjadi lebih bervariasi.

Di Jawa Barat, misalnya, Tasikmalaya, Cianjur, Garut dan Provinsi Banten menu nut pemberlakuan hukum Islam. Bupati Garut membentuk Lembaga Pengkajian Persiapan Penerapan Syariat Islam dalam rangka pemberlakuan syariat islam di daerahnya.

Di Sulawesi Selatan, enam dari 24 kabupaten secara tegas memberlakukan hukum islam. Keenam kabupaten itu adalah Bulukumba, Enrekang, Gowa, Takalar, Maros dan Sinjai. Demikian juga di Sumatera, puluhan perda yang mengatur pemberlakuan syariat Islam, tercatat antara lain di Sumatera Barat, dengan Perda No 11 Tahun 2001. Ditambah lagi dengan instruksi Wali Kota Padang pada 7 Maret 2005.

Di samping itu, Bengkulu memberlakukan Perda No 24 Tahun 2000, serta Instruksi No 3 Tahun 2004. Solok memberlakukan Perda No 10 Tahun 2001, serta Perda No 6 Tahun 2002. Sementara Riau, telah membentuk Komite Persiapan Penegakkan Syariat Islam, yang digalang oleh Hizbut Tahrir Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Meskipun di Jawa Timur secara umum gejala ini kurang begitu populer, di Pamekasan penerapan hukum Islam bahkan diberlakukan secara langsung melalui Surat Edaran Bupati No 450 Tahun 2002⁴⁶.

PKS melihat fenomena formalisasi syariat islam ini sebagai wajah demokrasi yang harus dihormati, pernyataan PKS yang terkesan mendukung ini diungkapkan Hidayat Nurwahid. Pernyataan Hidayat ini menjadi bisa difahami ketika dihubungkan dengan sikap PKS dalam penegakan syariat Islam. PKS tidak hanya dikenal sangat mendukung penerapan syariat Islam tetapi juga merancang sejumlah tahapan pelaksanaannya.

Jalan menuju formalisasi syariat Islam itu ditempuh dalam pilihan gerakan strategis, yaitu: gerakan individual, gerakan sosial dan pendidikan, gerakan sosial politik, gerakan legislasi, dan konstitusionalisme⁴⁷.

⁴⁶ Masa Depan Syariat Islam di Indonesia (Kajian Analitis tentang Prospek Formalisasi Hukum Islam, Pradana Boy ZTF.

⁴⁷Nandang Burhanuddin, Penegakan Syariat Islam Menurut Partai Keadilan, Jakarta: al-Jannah Pustaka, 2004), h. 107-118.8

Menurut PKS, terdapat tiga arti penerapan syari'at Islam. Pertama, mengakomodasi satuan-satuan hukum (perdata dan pidana) dalam konstitusi dan undang-undang serta berbagai penjelasan hukumnya. Kedua, mengisi segenap ruang konstitusi dan undang-undang dengan berbagai penjabaran hukumnya, di Indonesia, dengan ajaran Islam, sehingga dengan pengertian ini Islam dipandang sebagai aspek utama yang mewarnai seluruh sistem hukum nasional.

Terakhir, bahwa syari'at Islam mengatur Indonesia, dalam semua aspeknya, dengan cara Islam dan oleh orang-orang Islam. Sehingga ini bermakna bahwa Islam harus dipandang sebagai referensi utama sekaligus penguasa mayoritas⁴⁸

Fakta bahwa partai politik seperti PKS turut serta dalam gerbong formalisasi syari'at Islam, PKS berhasil menebar simpati di kalangan masyarakat luas, sehingga jika itu berhasil, maka berdasarkan tahapan strategi penerapan syari'at Islam oleh PKS, setidaknya tahapan pertama telah tercapai. Hanya saja, dalam perkembangan selanjutnya, PKS tidak lagi berfungsi sebagai partai politik an sich

IM menganggap bahwa syariat islam adalah sebuah keharusan karena dengan syariat islam permasalahan negara akan terselesaikan tak ada solusi jika syariat islam tidak digunakan, IM menganggap Syariat adalah solusi, syariat islam bukan hanya di sisi spiritual saja seperti puasa sholat dan lainnya syariat juga ada dalam pidana dan perdata, dalam *qisas* ataupun *rajam*, tak boleh membeda bedakan dua sisi penerapan sistem ini.

Namun belakangan PKS memiliki sikap yang tidak tegas dalam hal pemberlakuan syariat islam di Indonesia, PKS melihat penerapan Syariat islam janganlah hanya dilihat dari rajam atau Qisas saja namun Syariat islam haruslah dilihat dari semangat dan spiritual, seperti syariat tidak boleh mencuri, korupsi atau larangan lainnya, karenanya penerapan Syariat islam haruslah dilakukan secara gradual dan tertata rapi hingga rakyat memahami hakikat penerapan syariat islam⁴⁹.

Sikap PKS yang tidak tegas ini ketika Tim melakukan wawancara dengan tokoh dan anggota PKS mengatakan bahwa penerapan syariat islam secara utuh membutuhkan waktu yang panjang, itu agar masyarakat siap menerimannya, karena masyarakat belum

⁴⁸ ibid

⁴⁹ Ibid

memahami betul hakikat syariat islam ini, karenanya maka bahasa yang dipakai PKS saat ini adalah bahasa-bahasa kiasan agar masyarakat jangan apriori terebih dahulu⁵⁰.

PKS tidak menyuarakan isu penerepan syariat islam secara konstitusi namun Syariat islam adalah kehidupan realita sosial masyrakat dan bukan saja hanya dalam konstitusi hukum yang terealisasi dari sikap tidak korupsi dan islam yang mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat .

Hidayat Nur Wahid sebagaimana yang dikatakan dalam wawancara M Salaby mengatakan bahwa syariat Islam jangan difahami secara kaku dan Dogmatis, penerapannya haruslah sesuai dengan aturan dan undang-undang sebuah negara, persatuan dan kesatuan ummat haruslah diutamakan, Tindakan refresif hanyalah akan mengundang arus penolakan yang lebih luas, penerapan syariat islam haruslah dilakukan pada nilai-nilai berpolitik yang santun dan bersih, tidak KKN dan menguatkan SDM untuk pembangunan bangsa dan negara⁵¹.

1.7. Sikap PKS terhadap Terorisme dan Radikalisme

Para ilmuwan menyebut bahwa praktek terorisme dan radikalisme yang terjadi saat ini bisa dianalisa faktanya dengan melihat satu diantara tiga teori yang sangat populer, pertama adalah karena ummat islam tidak mampu membendung arus modernisasi yang terus berkembang dan terkesan menyudutkan islam, karenanya para pelaku terorisme mencari cara menghalalkan sikap radikalisme ini dengan menggunakan dalil dalil agama.

Teori kedua adalah teori yang mengatakan bahwa terorisme terdorong karena adanya fakta ketidakadilan yang menimpa nasib kawan-kawan mereka dibelahan negara muslim lainnya seperti di Palestina, Afghanistan, Kashmir dan Somalia, nasib mereka yang selalu ditekan dan dizalimi penjajah menyebabkan mereka melakukan tindakan radikalisme terhadap simbol simbol penjajah yang ada di indonesia.

Dan teori ketiga menyebut bahwa tindakan radikalisme terlahir karena negara tak mampu mewujudkan keadilan sosial bagi rakyatnya dan juga semakin parahnya perilaku korupsi dan penyalahgunaan wewenang pejabat, selama ini para teroris menggunakan

⁵⁰ Wawancara Tim Peneliti Al-Azhar dengan PKS pada 17 Mei 2010

⁵¹ M. Salaby, *Pemikiran Politik Hidayat Nur Wahid, Penerapan Syariat Islam di alam demokrasi studi kasus PKS*, , tanpa publikasi

alasan ini untuk melakukan tindakan terorisme dan radikalisme mereka ini terutama dalam kasus Indonesia.⁵²

Kasus-kasus radikalisme yang terjadi di Indonesia beberapa diantaranya paling tidak mengindikasikan keterlibatan secara tidak langsung PKS didalamnya itu terlihat dari kasus pengeboman JW Marriot 2009 yang melibatkan Ibrahim yang Istrinya adalah adik dari anggota Dewan PKS kota Tangerang, walau PKS secara tegas menolak keterlibatan ini dengan mengadakan konferensi pers yang menyatakan penyangkalan atas isu yang berkembang ditengah masyarakat yang sering menyudutkan PKS.

Jika melihat teori yang disebut diatas maka PKS masuk dalam kategori kedua, yaitu kelompok yang mengutuk kebiadaban penjajah terhadap warga muslim seperti di Palestina atau Afghanistan namun PKS tidak melakukan tindakan radikalisme dalam mengutuk perlakuan asing terhadap warga muslim di negara setempat.

Sikap PKS dan IM yang sangat mengutuk perlakuan asing terhadap warga muslim terlihat sangat mirip baik secara isu atau kebijakan terutama jika terkait dengan nasib bangsa Palestina, hanya saja PKS dan IM tidak menggunakan cara teroris dan radikal dalam mengecam tindakan para penjajah asing tersebut.

Dalam wawancara tim dengan tokoh tokoh PKS terutama Dewan Syariahnya menyebutkan bahwa PKS tidak mentelurir cara-cara radikalisme dalam mencapai tujuannya, tujuan yang baik haruslah dilakukan dengan cara yang baik pula, karenanya asing seharusnya mampu mencegah sikap berlebihan umat islam ini dengan kembali tunduk terhadap undang-undang atau hukum internasional terkait warga negara islam yang terjajah seperti di Palestina atau Afghanistan, selama asing tak mau mengubah paradigma berfikir mereka yang rasis ini maka kegiatan teroroisme mungkin akan tetap masih menjamur karena pemicu utamanya tak dipadamkan.

1.8. Politik Luar Negeri PKS

Dalam AD ARTnya PKS menyebut bahwa kebijakan Luar negeri PKS harus bebas aktif yang berarti PKS tak mau terlibat dalam salah satu ideologi sebuah bangsa atau negara,

⁵² Ilusi Negara Islam, LibForAll Fondation, 2009, Desantara Utama Media, Jakarta

PKS tak mau terlibat dalam salah satu ideologi bangsa besar saja baik kapitalisme atau sosialisme .

Isu yang diangkat terkait nasib bangsa Palestina adalah isu kemanusiaan dan bagian dari pengamalan pembukaan UUD 45, Indonesia yang mengecam dan tak restu atas fakta penjajahan dan perbudakan di dunia, menurut wawancara Tim, apa yang dilakukan IM dan PKS terkait dengan pembelaan atas kasus kemerdekaan bangsa Palestina tidaklah merupakan sebuah kebijakan struktural IM namun lebih pada kesamaan nasib sesama muslim saja yang dulu Indonesia terjajah negara-negara Timur tengah kemudian melakukan aksi solidaritas Internasional di negaranya masing-masing..

PKS juga menilai ketidakseriusan Indonesia dalam mengefektifkan relasi Timur tengah yang sangat kaya dengan modal yang tak habis, Indonesia belum mampu mengoptimalkan arti hubungan ini, karena negara-negara maju saja seperti Jepang dan AS begitu sangat serius menyakinkan investor Timur tengah agar mau berinvestasi di negaranya dan itu terbukti dengan banyaknya investasi Timur tengah di kedua negara tersebut⁵³.

PKS sebagai partai Islam menginginkan hubungan Indonesia-Timur tengah tidak terbatas pada hubungan sosial agama saja, namun sudah saatnya untuk meningkatkan hubungannya menjadi hubungan yang saling menguntungkan secara ekonomi dan kesejahteraan dan itu tercermin dari mengintensifkan hubungan ekonomi kedua negara .

Pernyataan PKS yang menginginkan peningkatan hubungan yang lebih baik lagi dengan negara-negara Timur tengah menurut wawancara Tim tidak bisa diartikan sebagai keinginan Indonesia kedepan berideologikan paham tertentu namun pertimbangan itu lebih pada pertimbangan ekonomi dan kemaslahatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai amanat Pancasila dan UUD 45.

Hal lain yang juga menarik untuk dikaji adalah pengaruh pemikiran Timur tengah rupanya masih kuat terjalin dengan personil-personil Timur tengah dan Indonesia dan ini terlihat dari sikap partai politik Islam PKS terkait kasus Palestina dan Israel maupun Iraq dan Afghanistan .

⁵³ Pernyataan tokoh PKS Mutammim Ula di TV One 2010

1.9. Sikap PKS terhadap NKRI

Dalam Musyawarah Majelis Syura X, PKS memiliki sikap terkait dengan NKRI, sikap itu terlihat dalam alenia ke empat yang berbunyi, dalam spirit menyambut hari Sumpah Pemuda, rasa tanggung jawab dan cinta terhadap masa depan bangsa, PKS menuntut segera atas pengesahan RUU Pornografi dalam rangka komitmen melaksanakan Pancasila, UUD 1945, menjaga keutuhan NKRI, meningkatkan kualitas seni budaya dan moralitas bangsa dalam semangat menghormati bhinneka tunggal ika

Menurut PKS, NKRI adalah final, PKS tak ingin memisahkan diri dari nusantara karena menurutnya persatuan Indonesia adalah final yang harus dijunjung tinggi, nilai nilai persatuan yang terkandung haruslah diamankan secara verbal.

Teori Khilafah⁵⁴ yang dikembangkan oleh IM adalah terori lunak yang tidak harus menjadikan sebuah negara memisahkan diri dari sebuah komunitas, sebuah negara tetap bisa menjadi negara dengan segala ideologinya, namun yang dituntut IM adalah keharusan negara tersebut menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam berbangsa dan bernegara⁵⁵.

Konsep NKRI yang usung oleh PKS dengan apa yang disebut IM tak terlihat adanya pertentangan, jadi bisa saja NKRI tetap utuh, namun secara budaya dan politik Indonesia harus menganut nilai-nilai islam yang luhur seperti yang sering diutarakan tokoh-tokoh PKS.

Namun wawancara Tim dengan Dewan Syariah atau Biro Hubungan luar negeri PKS menyatakan fakta-fakta tersebut adalah fakta *debatible* dan tidak ada kaitannya dengan kesamaan organisasi secara struktural namun semua itu hanya kesamaan ajaran islam yang merupakan sumber berfikir setiap muslim.

1.10. PKS, Peluang dan tantangan pada pemilu 2014

⁵⁴ IM mengusung Khilafah secara natural yang terbentuk dari benih-benih pribadi muslim, keluarga muslim, masyarakat muslim dan Negara islam lalu khilafah islamiyah

⁵⁵ Yusuf Al Wa`I, *Al Fikr As Syiasy lil Ikhwan*, Dar Risalah, 2000, Mesir

Andi Arif Mudatsir dalam seminar nasib partai politik Islam pada pemilu 2014 mengatakan, partai politik islam ditahun 2014 sangat mengkhawatirkan, bahkan anggota PPP ini mengatakan 2014 adalah tahun kiamat bagi partai politik islam di Indonesia⁵⁶.

Banyak analisa yang diungkap Andi mengenai penyebab kematian partai politik islam di Indonesia ditahun 2014 nanti, diantara analisa yang disampaikan adalah perolehan suara partai politik islam yang terus mengalami kemunduran dari satu pemilu ke pemilu lainnya, analisa penurunan itu adalah karena islam dijadikan sebagai agama simbolik semata dan agama tidak lagi bersifat aplikatif yang terlihat di kehidupan sosial politik masyarakat sehari-hari baik dipartai politik islam itu sendiri atau pun di tokoh-tokoh partai politik islam ini.

Jika Islam hanya menjadi simbol partai politik saja lalu tak mampu memecahkan solusi bangsa dan negara maka itu pertanda serius bagi kematian partai politik Islam di Indonesia, rakyat akan semakin apriori dengan partai politik termasuk dengan kedatangan partai politik Islam, karenanya pemilu 2009 jika partai politik islam dikumpulkan seluruh perolehan suaranya maka perolehan itu belumlah mampu menandingi perolehan suara partai nasional yang non islamis. Sebuah bukti akan kebenaran analisa Arif tadi.

Pemilu 2009 menghasilkan PKS sebagai satu-satunya partai politik islam yang mampu mempertahankan perolehan suaranya dengan berada pada kisaran 7 persen, banyak analisa yang menganalisa sebab-sebab keberhasilan PKS mempertahankan perolehan suaranya, diantara analisa itu adalah banyaknya perpecahan partai politik islam selain PKS, PPP pecah antara kubu Bakhtiar dengan Surya Dharma Ali, PKB antara Gusdur dengan Muhaimin dan PBR antara Zainal Ma`arif dengan Ade Nasution.

Analisa lain menyebutkan bahwa PKS berhasil membuka diri menjadi partai yang terbuka dan tidak inklusif lagi sehingga terlihat dalam PKS banyak non Muslim yang muncul mewakili kursi DPRD di beberapa daerah.

Semua analisa kesuksesan PKS ini jika bisa dipertahankan maka bisa saja PKS dipemilu 2014 nanti menaikkan perolehan suaranya dan akan masuk menjelma menjadi partai tiga terbesar secara nasional .

Namun yang harus dipikirkan PKS adalah jika rancangan undang-undang partai politik yang mengusulkan bahwa partai politik dalam negeri tidak boleh memiliki

⁵⁶ Seminar DPR tentang Partai Politik Islam pada 2010 di gedung Nusantara

hubungan apapun dengan organisasi internasional, jika rancangan UUD ini berhasil digolkan maka PKS 2014 nanti riwayatnya akan selesai walau memang tak ada bukti verbal dan kuat akan keterlibatan PKS namun jika bukti-bukti awal dalam penelitian ini menjadi bukti perdana menguatkan hubungan PKS dengan IM maka itu pertanda buruk bagi partai berlambang ka`bah ini⁵⁷.

Penelitian ini juga kedepan seharusnya mampu menyempurnakan hasil penelitiannya ini dengan mendatangi DPP IM di Mesir untuk menguatkan akan ada tidaknya hubungan kedua organisasi ini, dan keputusan-keputusan politik PKS adalah buah dari keputusan besar DPP IM yang seolah PKS hanya menjalankan keputusan-keputusan tersebut.

⁵⁷ Dalam undang-undang pemilu sebelumnya di jelaskan partai politik tidak boleh memiliki hubungan dengan organisasi Internasional, lihat peraturan UUD pemilu 2004, KPU Jakarta

BAB V

KESIMPULAN

IM dan PKS adalah dua organisasi islam yang sama-sama mengusung prinsip dan nilai bahwa Islam adalah solusi (*Al-Islam Hual Hill*), visi dan misi kedua organisasi islam ini juga relatif sama, itu terlihat dari slogan-slogan dan visi misinya yang terkenal seperti Allah Tujuanku, Muhammad Suri Tauladanku, Al-Quran pedoman hidupku dan Mati dijalan Allah adalah cita-cita tertinggiku⁵⁸. Namun persamaan ideologi PKS dan IM ini diakui tokoh PKS sebagai sebuah kesamaan organisasi dan kebetulan semata dan bukan merupakan sebuah ikatan hirarki organisasi .

Secara hirarki struktural, PKS memang tidak memiliki indikasi serta bukti akan keterlibatannya dengan organisasi terbesar dunia tersebut, namun sebagai bukti awal akan keterlibatan PKS sebagai bagian dari gerakan IM adalah pernyataan resmi website IM yang bermarkas di Mesir yang secara gamblang mengatakan bahwa PKS adalah bagian (*Alfar`ul Al-Qathary*) dari gerakan IM⁵⁹

Jika melihat visi misi PKS dan membandingkannya dengan visi misi gerakan IM maka ditemukan dengan kasat mata akan adanya kesamaan ideologi dan visi dalam dua organisai islam ini, walau pihak PKS tidak mengakui adanya kesatuan struktur organisasi tetap bersikukueuh bahwa PKS tidak memiliki hubungan apapun dengan IM termasuk hubungan organisai, walaupun disatu sisi bahwa kedekatan tokoh PKS dengan IM terjalin dengan begitu intens namun itu PKS akui hanya sebatas kedekatan antara sesama muslim semata.

Pengakuan situs resmi gerakan IM di Mesir yang menyebut bahwa PKS adalah cabang resmi dari IM, namun begitu, pengakuan website ini tidaklah merupakan bukti valid akan adanya ikatan dua organisasi ini, justru hubungan akan menjadi kuat dan valid serta fakta yang tak terbantahkan jika IM pusat Mesir memiliki surat pengangkatan

⁵⁸ Lihat Majmu Rasail Hasan Al-Banna yang memuat prinsip dasar gerakan Ikhwanul Muslimin

⁵⁹ Lihat lampiran

cabangnya di Indonesia yang merupakan syarat diakuinya sebuah cabang internasional yang berdiri di negara lain⁶⁰, jika pernyataan ini bisa dibuktikan, maka akan didapati fakta bahwa PKS adalah bagian dari IM.

Dalam beberapa kebijakan politik nasional dan Internasional yang diangkat PKS selalu saja memiliki kemiripan dengan kebijakan yang diangkat IM, itu terlihat dari kebijakan terhadap masalah Palestina, Islam adalah solusi (formalisasi Islam dalam undang-undang positif) serta visi misi yang sangat terlihat sama bahkan merupakan kopian dari visi misi IM yang bermarkas di Mesir.

Jika bukti pernyataan IM pusat bisa diperoleh maka pengakuan itu menjadi bukti nyata akan hubungan PKS sebagai cabang IM dan pastinya memiliki agenda-agenda yang sama dengan IM yaitu menjadikan Islam sebagai solusi dari masalah-masalah bangsa yang ada dengan menformalkan ajaran Islam dalam undang-undang Indonesia.

Karenanya penelitian ini akan menjadi lebih kuat dan lebih faktual jika penelitian ini langsung mengecek adanya cabang-cabang yang dimiliki IM diseluruh dunia dengan surat pernyataan resmi dari DPP IM (*Maktab Irsyad*), sebab jikalau ada persamaan visi dan misi maka banyak alasan yang bisa digunakan PKS untuk membantah hubungan organisasi IM dengan organisasi politiknya ini.

Jika PKS adalah bagian dari IM maka yang terjadi sebenarnya adalah kebijakan-kebijakan politik PKS yang diusung selama ini adalah sebenarnya perwujudan dari kebijakan jangka panjang IM, namun jika keterlibatan hubungan ini tak didapati maka kebijakan PKS yang kadang mirip dengan IM itu murni hanya kebetulan atau kemiripan semata saja, dan wawancara Tim dengan para tokoh PKS adalah fakta yang tak terbantahkan akan tidak ada hubungan antara PKS dan IM.

⁶⁰ Lihat Lampran AD ART IM

REFERENSI

1. Azyumardi Azra, 2005, *Jaringan Ulama Nusantara-Indonesia abad 17-18*, Mizan Bandung.
2. Azyumardi Azra, 2007, *Jejak-Jejak Jaringan Kaum Muslimin*, Hikmah, Jakarta
3. Ahmad Mansur Suryanegara, 1995, *Menemukan Sejarah*, Mizan, Bandung.
4. Budiardjo, Miriam, 2004, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cetakan duapuluh enam, Gramedia, Jakarta.
5. Dasar-dasar ilmu politik, 2006, Miriam Budiardjo, Gramedia, Jakarta
6. Greg Fealy & Anthony Bubalo, 2007, *Jejak Kafilah, Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia*, cetakan pertama, Mizan, Bandung.
7. Hisyam, M, 1999, *Metodologi Penelitian Sosial*, PMB, Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia, Jakarta.
8. Juowono Sudarsono, *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik*, Gramedia, Jakarta, 1976.
9. LibForAll Fondution, *Ilusi Negara Islam*, 2009, Desantara Utama Media, Jakarta
10. Moleong, Lexi, J, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja rosdakarya, Bandung.
11. M. Salaby, *Pemikiran Politik Hidayat Nur Wahid, Penerapan Syariat Islam di alam demokrasi studi kasus PKS*, tanpa publikasi
12. Mukaddimah Ibnu Khaldun, 2000, Ibnu Khaldun, Dar Jail Bairut
13. Masa Depan Syari'at Islam di Indonesia (Kajian Analitis tentang Prospek Formalisasi Hukum Islam, Pradana Boy ZTF.
14. Mas`ud Mukhtar, 1990, *Ilmu Hubungan International, Disiplin dan Metodologi*

15. Nandang Burhanuddin, Penegakan Syari'at Islam Menurut Partai Keadilan, Jakarta: al-Jannah Pustaka, 2004), h. 107-118.8
16. Natalie Mobini Kasheh, 2007, *Hadrami Awakening*, Akabar Media Eka Sarana,
17. Political Party and Political System, 1977, Alan Ware, Oxfport.
18. William R. Liddle, "Media Dakwah Scripturalism: One Form of Islamic Political Thought and Action in New Order Indonesia", dalam *Toward a New Paradigm: Recent Development in Indonesian Islamic Thought*, Mark R Woodward (ed) (Arizona: Arizona State University, 1996), 323-56
19. Saidi Anas, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial*, LIPI, Jakarta.
20. Syahrastani, *Al-Milal wan Nihal*, 2000, Dar Fikr, Bairut,
21. Yin, Robert, 2004, *Studi Kasus Desain dan Metode*, cetakan kelima, Rajawali Press, Jakarta.
22. Utsaimin, *Dakwah Wahabiyah Dakwah Islahiyah*, 2000, Riyadh, Saudi Arabia, Jakarta
23. Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Daulah*, 1998, Dar Risalah, Mesir
24. Yusuf Al-Wa`I, *Al Fikr As Syiasy lil Ikhwan*, Dar Risalah, 2000, Mesir

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1) LAMPIRAN AD/ART IKHWANUL MUSLIMIN (IM) TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN CABANG
INTERNASIONALNYA DI LUAR MESIR PADA BAB V PASAL 49

اللائحة العالمية لجماعة الإخوان المسلمين

مقدمة:

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، بلَّغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابه وسلم.. وبعد،

ففي التاسع من شوال 1402 هجرية الموافق 29 يوليو 1982م ميلادية انعقد مجلس الشورى العالمي وفقاً لللائحة المؤقتة السابق اعتمادها من فضيلة المرشد العام للجماعة بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1398 هجرية الموافق 10 مايو 1978 ميلادية، وتم إقرار النظام العام لجماعة الإخوان المسلمين، وأصبح هذا النظام (اللائحة) والمتضمن سبعة وأربعون مادةً تنتظمها خمسة أبواب؛ ملزماً لجميع الأقطار والأفراد.

وبعد مرور ما يزيد عن عشر سنوات من إقرار هذا النظام، وبناءً على اتساع نشاط الجماعة، وعلى ضوء ما مر بها من تجارب، وسعيًا إلى الوصول إلى الأكمل بعون الله تعالى؛ فقد قامت الجماعة بإجراء دراسة تقويمية لنشاطاتها والأسس التنظيمية لها، ومن بينها النظام العام الذي يحكم حركتها، وقد أجمعت الآراء على أنه لا خلاف حول ما نصت عليه اللائحة من أهداف ووسائل، وأن الأمر بالنسبة لهاتين النقطتين لا يتطلب تعديلاً لائحياً، قدر ما يتطلب الاجتهاد في العمل لتحقيقهما بالصورة المتكاملة، والالتزام الفعلي للأقطار والأفراد بما تمَّ الإشارة إليه والنص عليه.

وانتهت بعض هذه الآراء إلى أن المطلوب بعد هذه المرحلة إجراء تعديلات تشمل:

1- مدة ولاية المرشد العام.

2- تعديل نسب ممثلي الأقطار في مجلس الشورى، حسب تغير أحوال بعض الأقطار، مع التوسع في أعداد

الإخوة أصحاب الاختصاص الذين يضافون إلى المجلس بطريقة الاختيار للاستفادة من خبراتهم.

3- التوسع في تفصيل حقوق الأفراد تجاه الجماعة وتجاه إخوانهم.

4- إعادة صياغة المادة الخاصة بالبيعة؛ ليكون واضحاً أنها تُؤخذ من الفرد ولشخص المرشد العام للجماعة تحديداً.

5- ضبط عضوية الأقطار في التنظيم العالمي؛ لتكون موازيةً لضبط عضوية الفرد في القطر. وبتاريخ 16 من شوال 1414 هجرية الموافق 28 من مارس 1994م ميلادية، قام مجلس الشورى بدراسة ما قُدم إليه من مقترحات، وأقر التعديلات الجديدة التي ضمنها النظام العام (اللائحة)، وأصدرها متضمنة أربع وخمسون مادةً، تنتظمها ستة أبواب وهي المرفقة مع هذه المقدمة.

وبناءً على ذلك؛ فإنني أطلب من كل الإخوان الالتزام الصادق بهذه اللائحة، وبذل أقصى الجهد لتحقيق أهدافها، سانلين المولى عز وجل أن يهيئ لهذه الجماعة أمر رشدها؛ لتقوم بأداء رسالتها على الوجه الذي يرضيه عنها.

كما نسأله أن يرحم إمامنا الشهيد حسن البنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأن يلحقنا بهم على الخير ونحن مستمسكون بقرآن ربنا دستورنا وبسنة زعيمنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه سبحانه غايتنا وولينا وهو نعم المولى ونعم النصير.. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.. والله أكبر والله الحمد.

المرشد العام

محمد حامد أبو النصر

القاهرة في: غرة ذي القعدة 1414 هجرية = 12 أبريل 1994 ميلادية.

بسم الله الرحمن الرحيم

النظام العام للإخوان المسلمين

الباب الأول:

اسم الجماعة ومقرها

مادة (1): في شهر ذي القعدة 1347هج 1928م تألفت جماعة الإخوان المسلمين، ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز نقل القيادة في الظروف الاستثنائية بقرار من مجلس الشورى إذا تعذر ذلك من مكتب الإرشاد.

الباب الثاني:

الأهداف والوسائل

مادة (2): الإخوان المسلمون هيئة إسلامية جامعة، تعمل لإقامة دين الله في الأرض، وتحقيق الأغراض التي جاء من أجلها الإسلام الحنيف، ومما يتصل بهذه الأغراض:

أ- تبليغ دعوة الإسلام إلى الناس كافة وإلى المسلمين خاصة، وشرحها شرحًا دقيقًا يوضحها ويردها إلى فطرتها وشمولها، ويدفع عنها الأباطيل والشبهات.

ب- جمع القلوب والنفوس على مبادئ الإسلام، وتجديد أثرها الكريم فيها، وتقريب وجهات النظر بين المذاهب الإسلامية.

ج- العمل على رفع مستوى المعيشة للأفراد وتنمية ثروات الأمة وحمايتها.

د- تحقيق العدالة الاجتماعية والتأمين الاجتماعي لكل مواطن، ومكافحة الجهل والمرض والفقر والرديلة، وتشجيع أعمال البر والخير.

هـ- تحرير الوطن الإسلامي بكل أجزائه من كل سلطان غير إسلامي، ومساعدة الأقليات الإسلامية في كل مكان، والسعي إلى تجميع المسلمين حتى يصيروا أمة واحدة.

و- قيام الدولة الإسلامية التي تنفذ أحكام الإسلام وتعاليمه عمليًا، وتحرسها في الداخل، وتعمل على نشرها وتبليغها في الخارج.

ز- مناصرة التعاون العالمي مناصرة صادقة في ظل الشريعة الإسلامية التي تصون الحريات وتحفظ الحقوق، والمشاركة في بناء الحضارة الإنسانية على أساس جديد من تآزر الإيمان والمادة، كما كفلت ذلك نظم الإسلام الشاملة.

مادة (3): يعتمد الإخوان المسلمون في تحقيق هذه الأغراض على الوسائل الآتية:

أ- الدعوة: بطريق النشر والإذاعة المختلفة من الرسائل والنشرات والصحف والمجلات والكتب والمطبوعات وتجهيز الوفود والبعثات في الداخل والخارج.

ب- التربية: لتطبع أعضاء الجماعة على هذه المبادئ، وتعكس معنى التدين قولاً وعملاً في أنفسهم أفراداً وبيوتاً، وتربيتهم تربية سالحة؛ عقيدياً وفق الكتاب والسنة، وعقلياً بالعلم، وروحياً بالعبادة وخلقياً بالفضيلة، وبدنياً بالرياضة، وتثبيت معنى الأخوة الصادقة والتكامل التام والتعاون الحقيقي بينهم؛ حتى يتكون رأي إسلامي موحد، وينشأ جيل جديد يفهم الإسلام فهماً صحيحاً، ويعمل بأحكامه ويوجه النهضة إليه.

ج- التوجيه: بوضع المناهج السالحة في كل شئون المجتمع من التربية والتعليم والتشريع والقضاء والإدارة والجنديّة والاقتصاد والصحة والحكم، والتقدم بها إلى الجهات المختصة، والوصول بها إلى الهيئات السياسية والتشريعية والتنفيذية والدولية لتخرج من دور التفكير النظري إلى دور التنفيذ العملي، والعمل بجد على تنقية وسائل الإعلام مما فيها من شرور وسينات والاسترشاد بالتوجيه الإسلامي في ذلك كله.

د- العمل: بإنشاء مؤسسات تربوية واجتماعية واقتصادية وعلمية، وتأسيس المساجد والمدارس والمستوصفات والملاجئ والنوادي، وتأليف اللجان لتنظيم الزكاة والصدقات وأعمال البر والإصلاح بين الأفراد والأسر، ومقاومة الآفات الاجتماعية والعادات الضارة والمخدرات والمسكرات والمقامرة، وإرشاد الشباب إلى طريق الاستقامة، وشغل الوقت بما يفيد وينفع ويستعان على ذلك بإنشاء أقسام مستقلة طبقاً للوائح خاصة.

هـ- إعداد الأمة: إعداداً جهادياً؛ لتقف جبهة واحدة في وجه العزاة والمتسلطين من أعداء الله، تمهيداً لإقامة الدولة الإسلامية الراشدة.

الباب الثالث:

الأعضاء وشروط العضوية

مادة (4):

أ- يقضي المرشح لعضوية الجماعة مدة سنة على الأقل تحت الاختبار، فإذا ثبت قيامه بواجبات العضوية، مع معرفته بمقاصد الدعوة ووسائلها، وتعهد بأن يناصرها ويحترم نظامها، ويعمل على تحقيق أغراضها، ثم وافقت الجهة المسئولة عنه على قبوله عضواً في الجماعة؛ فيصبح أخصاً منتظماً لمدة ثلاث سنوات.

ب- إذا ثبت خلال السنوات الثلاث الآتفة الذكر قيام الأخ بواجبات عضويته؛ فللجهة المسئولة أن تقبله أخصاً عاملاً على أن يؤدي البيعة التالية لفضيلة المرشد العام:

(أعاهد الله العظيم على التمسك بأحكام الإسلام والجهاد في سبيله، والقيام بشروط عضوية جماعة الإخوان المسلمين وواجباتها، والسمع والطاعة لقيادتها في المنشط والمكروه- في غير معصية- ما استطعت إلى ذلك سبباً،

وأبايع على ذلك، والله على ما أقول وكيل). ويمكن أن تؤخذ لشخص المرشد العام أمام المراقب العام للقطر (أو من ينوب عنه) إذا تعذر إعطاؤها للمرشد العام مباشرة.

مادة (5): على كل عضو أن يدفع اشتراكًا ماليًا شهريًا أو سنويًا وفق النظام المالي لكل قطر، ولا يمنع ذلك من المساهمة في نفقات الدعوة بالتبرع والوصية والوقف وغيرها، كما أن للدعوة حقًا في زكاة أموال القادرين على ذلك.

مادة (6): إذا قصر العضو في بعض واجباته، أو فرط في حقوق الدعوة اتخذت الإجراءات الجزائية اللازمة في حقه، وفق النظام الجزائي الخاص بقطره بما في ذلك الإعفاء من العضوية.

مادة (7): لكل أخ الحق في التعبير عن رأيه، وفق آداب الإسلام وبالصورة التنظيمية.

مادة (8): للأخ الحق في المبادرة والابتكار في الاقتراحات المختلفة.

مادة (9): للأخ الحق في التظلم والمقاضاة والاستئناف.

مادة (10): للأخ على الجماعة وعلى إخوانه الحق في التكافل والتضامن كما أمر الإسلام.

الباب الرابع:

الهيئات الإدارية الرئيسية للإخوان المسلمين

مادة (11): الهيئات الإدارية الرئيسية للإخوان المسلمين هي: المرشد العام، مكتب الإرشاد العام، مجلس الشورى العام.

أولاً: المرشد العام:

مادة (12): المرشد العام للإخوان المسلمين هو المسنول الأول للجماعة، ويرأس مكتب الإرشاد ومجلس الشورى العام، ويقوم بالمهام التالية:

أ- الإشراف على كل إدارات الجماعة، وتوجيهها، ومراقبة القائمين على التنفيذ، ومحاسبتهم على كل تقصير وفق نظام الجماعة.

ب- تمثيل الجماعة في كل الشئون والتحدث باسمها.

- ج- تكليف من يراه من الإخوان للقيام بمهام يحدد نطاقها له.
د- دعوة المراقبين العامين الممثلين للأقطار للاجتماع عند الحاجة.

مادة (13): يشترط فيمن يرشح مرشداً عاماً ما يلي:

- أ- لا يقل عمره عن أربعين سنةً هلاليةً.
ب- أن يكون قد مضى على انتظامه أحياناً عاملاً مدة لا تقل عن خمس عشرة سنةً هلاليةً.
ج- أن تتوفر فيه الصفات العلمية (وخاصةً فقه الشريعة) والعملية والخلقية التي تؤهله لقيادة الجماعة.

مادة (14): يتم اختيار المرشد العام وفق المراحل الآتية:

أ- يقوم مكتب الإرشاد العام بعد استشارة المكاتب التنفيذية في الأقطار أو المراقبين العامين أو ثلث أعضاء مجلس الشورى بترشيح أكثر اثنين قبولاً لدى المكاتب إذا لم يتم الإجماع على واحد ممن تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة (13).

ب- بناء على ذلك وبقرار من مكتب الإرشاد العام؛ يوجه نائب المرشد العام الدعوة إلى مجلس الشورى العام لاجتماع مدته أسبوع كحد أقصى يجري فيه انتخاب المرشد العام الجديد، ويحدد في الدعوة الزمان والمكان والموضوع والنصاب، وتوجه الدعوة قبل شهر على الأقل من الموعد المحدد.

ج- ينعقد اجتماع مجلس الشورى العام برئاسة نائب المرشد العام، فإذا كان هو المرشح فأكبر الأعضاء سنّاً، ويجري انتخاب المرشد العام بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس (النصاب لا يقل عن الثلثين)، فإذا لم يتم ذلك أُجِّل الاجتماع إلى موعد آخر لا يقل عن شهر ولا يزيد عن شهرين ولمدة أسبوع أيضاً، ويجري فيه انتخاب المرشد العام بالأكثرية المطلقة من أعضاء المجلس (النصاب لا يقل عن ذلك).

مادة (15): عندما يتم اختيار المرشد العام يؤدي العهد التالي أمام مجلس الشورى العام:

(أعاهد الله تعالى على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، والالتزام بمنهاج الإخوان المسلمين، ونظامهم الأساسي، منفذاً لقرارات الجماعة المناطة بي ولو خالفت رأبي، والله على ما أقول شهيد).

ثم يجدد أعضاء مجلس الشورى العهد أمام فضيلة المرشد العام، مستشعرين أركان البيعة العشرة:

(أعاهد الله العظيم على التمسك بأحكام الإسلام والجهاد في سبيله، والقيام بشروط عضوية جماعة الإخوان المسلمين وواجباتها، والسمع والطاعة لقيادتها في المنشط والمكره- في غير معصية- ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وأباعد على ذلك، والله على ما أقول وكيل).

مادة (16): يضطلع المرشد العام بمهمته فور انتخابه وأدائه للعهد، وعليه أن يستقيل من عمله الخاص ويتفرغ للمهمة التي اختير لها، ويبقى في مسنوليته ما دام أهلاً لذلك.

مادة (17): لا يصح للمرشد العام بشخصه ولا بصفته أن يشترك في إدارة شركات أو أعمال اقتصادية، حتى ما يتصل فيها بالجماعة وأغراضها صيانةً لشخصه وتوفيراً لوقته ومجهوده على أن يكون له الحق في مزاوله الأعمال العلمية والأدبية بموافقة مكتب الإرشاد العام.

مادة (18): تتحمل الجماعة نفقات المرشد العام وفق اللائحة المالية الخاصة بالمتفرغين.

مادة (19): تنتهي ولاية المرشد العام في الحالات الآتية:

أ- إذا أخل المرشد العام بواجباته، أو فقد الأهلية اللازمة... فلمجلس الشورى دراسة الوضع واتخاذ القرار المناسب فإذا وجد أن مصلحة الدعوة تقتضي إعفائه يدعو إلى جلسة أخرى مخصصة لذلك، ويجب أن يصدر قرار الإعفاء بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس.

ب- إذا قدم المرشد العام استقالته يدعو مكتب الإرشاد مجلس الشورى لدراسة أسباب الاستقالة واتخاذ القرار المناسب، وفي حالة إصرار المرشد على استقالته يتم قبولها بالأكثرية المطلقة لأعضاء المجلس.

ج- إذا توفى المرشد العام يتولى نائبه صلاحياته كافة، وتتخذ إجراءات انتخاب جديد وفق المادة (13) من هذه اللائحة.

مادة (20): يختار المرشد العام نائباً له أو أكثر من بين أعضاء مكتب الإرشاد العام.

مادة (21): تكون مدة ولاية المرشد العام ست سنوات قابلة للتجديد، ويستثنى من ذلك المرشد الحالي.

مادة (22): يحتفظ المرشد العام بعد انتهاء ولايته بعضوية مجلس الشورى العالمي مدى الحياة، إلا إذا كان انتهاء الولاية داخلاً تحت نص الفقرة (أ) من المادة (19) من اللائحة، وهي الإخلال بواجباته أو فقد الأهلية.

ثانياً: مكتب الإرشاد العام:

مادة (23): مكتب الإرشاد العام هو القيادة التنفيذية العليا للإخوان المسلمين، والمشرف على سير الدعوة والموجه لسياساتها وإدارتها.

مادة (24): يتألف مكتب الإرشاد من ثلاثة عشر عضوًا عدا المرشد العام، يتم اختيارهم وفق الأسس التالية:

- أ- ثمانية أعضاء ينتخبهم مجلس الشورى من بين أعضائه من الإقليم الذي يقيم فيه المرشد العام.
- ب- خمسة أعضاء ينتخبهم مجلس الشورى من أعضائه، ويراعى في اختيارهم التمثيل الإقليمي.
- ج- يختار المرشد العام من بين أعضاء مكتب الإرشاد أمينًا للسر وأمينًا للمالية.

مادة (25): يشترط فيمن يرشح لعضوية مكتب الإرشاد العام ما يلي:

- أ- أن يكون من بين أعضاء مجلس الشورى العام.
- ب- ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة هجرية.
- ت- أن ينفرد من عمله لعضوية مكتب الإرشاد العام.

مادة (26): إذا تم انتخاب أعضاء المكتب يؤدي كل منهم أمام المجلس العهد التالي:

أعاهد الله تعالى على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أكون حارسًا لمنهاج الإخوان المسلمين ونظامهم الأساسي، منفذًا لقرارات مكتب الإرشاد وإن خالفت رأبي، مجاهدًا في سبيل تحقيق غاية الجماعة العامة ما استطعت إلى ذلك سبيلًا، وأبابع الله على ذلك، والله على ما أقول وكيل).

مادة (27): مدة ولاية مكتب الإرشاد أربع سنوات هجرية، ويجوز اختيار العضو لأكثر من مرة، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل مضي المدة المحددة حل محله الذي يليه في عدد الأصوات في انتخابات المكتب، وإذا كان أحد أعضاء المكتب مراقبًا عامًا في قطره، فعلى القطر أن يختار مراقبًا بدله.

مادة (28): من واجبات عضو المكتب الحرص على مصلحة الجماعة، والمواظبة على حضور الجلسات، والحفاظ على سرية المداولات واحترام القرارات ولو كانت مخالفة لرأيه الخاص، وليس له نقدها أو الاعتراض عليها متى صدرت بصورة قانونية، والقيام بالمهام التي يكلف بإنجازها على أكمل وجه، وإذا قصر في واجبات عضويته كان للمكتب أن يواخذه على التقصير بلفت نظره أو إنذاره أو بالإيقاف مدة لا تزيد عن شهر، أو بالإعفاء من عضوية المكتب، ويجب أن يصدر قرار الإعفاء من مجلس الشورى في جلسة يحضرها العضو ليشرح وجهة نظره فيما نُسب إليه.

مادة (29): يقوم مكتب الإرشاد العام بالمهام الآتية:

أ- تحديد مواقف الجماعة الفكرية والسياسية من كافة الأحداث العالمية، أو تلك التي ترتبط بسياسة الجماعة، أو التي تؤثر في أي قطر من الأقطار، وذلك في ضوء الخطة العامة التي يضعها مجلس الشورى مع مراعاة أحكام المادة (50) من الباب السادس، وله أن يقوم بنفسه أو يكلف من يرى بتأليف الرسائل وإصدار النشرات والتعليمات التي تكفل شرح الدعوة وبيان أغراضها ومقاصدها، ومراجعة ما تصدره تنظيمات الأقطار قبل نشره لصلته بصميم الفكرة.

ب- الإشراف على سير الدعوة وتوجيه سياستها، وتنفيذ أحكام اللائحة العامة، ومراقبة القائمين على التنفيذ.

ج- رسم الخطوات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الشورى العام في جميع الأقطار.

د- تكوين اللجان والأقسام المتخصصة في المجالات اللازمة، واعتماد لوائحها ومحاسبتها.

هـ- وضع الخطة العامة وعرضها على مجلس الشورى العام لاعتمادها.

و- إعداد التقرير السنوي العام عن أعمال القيادة وأحوال الجماعة والوضع المالي لعرضه على مجلس الشورى العام.

ز- اختيار مراجع للحسابات من غير أعضائه.

مادة (30): جلسات المكتب دورية وتحدد بقرار منه، وعلى كل عضو حضور الجلسات الدورية دون حاجة إلى دعوة، ويجتمع المكتب في غير الموعد الدوري إذا حدث ما يدعو إلى ذلك بدعوة من المرشد العام أو من يقوم مقامه أو بطلب يقدم إليه من أحد أعضائه، وبموافقة أربعة أعضاء على الطلب، وتكون الجلسة قانونية إذا حضرها أغلبية الأعضاء المطلقة، وتكون القرارات صحيحة متى صدرت عن الأغلبية المطلقة للحاضرين، وإذا تساوت الأصوات رجح جانب رئيس الجلسة.

مادة (31): يرأس اجتماعات المكتب المرشد العام أو نائبه عند غيابه أو أكبر الأعضاء سنّاً في حالة تخلف النائب، يتلى محضر الاجتماع السابق ويصدق عليه، ثم ينظر في جدول الأعمال ولا يكون القرار المتخذ في غياب المرشد أو نائبه نافذاً إلا بعد اعتماده من أحدهما.

مادة (32): أمين السر العام يمثل مكتب الإرشاد العام تمثيلاً كاملاً في كل المعاملات إلا في الحالات الخاصة التي يرى المكتب فيها انتداب أخ آخر بقرار قانوني منه.

مادة (33): تشكل الأمانة العامة من جهاز تنفيذي، يرأسه الأمين العام على أن يقيم في البلد الذي يقيم فيه المرشد، ويجوز أن تمارس عملها من خارج بلده إذا دعت الضرورة لذلك.

مادة (34): مهمة أمين السر العام متابعة تنفيذ قرارات مكتب الإرشاد، ومراقبة نواحي النشاط وأقسام العمل، وله أن يستعين بغيره من الأعضاء أو الموظفين، ولكنه هو المسئول أمام المكتب عما يسند إليه من أعمال، وفي حالة غيابه أو تعذر قيامه بعمله ينتدب المكتب من بين أعضائه من يحل محله مؤقتاً.

مادة (35): مهمة أمين المالية ضبط أموال الجماعة، وحصر ما يرد منها وما يصرف ومراقبة كل نواحي النشاط المالي والحسابي، والإشراف على تنظيمها وفق اللائحة المالية، وإحاطة المكتب علماً بذلك في فترات متقاربة، وله أن يستعين بغيره من الإخوان العاملين تحت مسنوليته، وفي حالة غيابه أو تعذر قيامه بعمله ينتدب المكتب من يقوم بمهمته مؤقتاً.

ثالثاً: مجلس الشورى العام:

مادة (36): مجلس الشورى العام هو السلطة التشريعية لجماعة الإخوان المسلمين وقراراته ملزمة، ومدة ولايته أربع سنوات هجرية.

مادة (37):

أ- يتألف مجلس الشورى العام من ثلاثين عضواً على الأقل، يمثلون التنظيمات الإخوانية المعتمدة في مختلف الأقطار، ويتم اختيارهم من قبل مجالس الشورى في الأقطار من بين أعضائها.

ب- يجوز لمجلس الشورى إضافة خمسة أعضاء من ذوي الاختصاص إلى عضوية المجلس.

ج- يمكن تمثيل أية تنظيم إخواني جديد في مجلس الشورى إذا اعتمده مكتب الإرشاد العام.

د- إذا كان ممثل القطر في مجلس الشورى العام واحداً، فيجب أن يكون هو المراقب العام، وإذا كان للقطر أكثر من ممثل فيجب أن يكون المراقب العام أحدهم، وإذا تعذر مشاركة المراقب العام كعضو ثابت في المجلس يمكن للقطر اختيار غيره.

مادة (38): يشترط فيمن يختار لمجلس الشورى الشروط الآتية:

أ- أن يكون من الإخوان العاملين الذين مارسوا عضوية المكتب التنفيذي أو مجلس الشورى في أقطارهم.

ب- ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة هجرية.

ج- أن يكون قد مضى على اتصاله بالدعوة خمس سنوات على الأقل.

د- أن يكون متصفاً بالصفات الخلقية والعلمية التي تؤهله لذلك.

ه- أن لا تكون قد صدرت في حقه عقوبة التوقيف خلال الخمس سنوات السابقة.

مادة (39): يقوم مجلس الشورى العام بالمهام التالية:

أ- انتخاب المرشد العام وأعضاء مكتب الإرشاد العام وفق المادتين (14)، (24).

ب- إقرار الأهداف والسياسات العامة للجماعة، وتحديد موقفها من مختلف الاتجاهات والتجمعات والقضايا المتنوعة.

ج- إقرار الخطة العامة والوسائل التنفيذية اللازمة.

د- مناقشة التقرير العام السنوي والتقرير المالي وإقرارهما، واعتماد الميزانية للعام الجديد.

ه- انتخاب أعضاء المحكمة العليا التي تنظر في القضايا التي تحول إليها من قبل المرشد العام أو مكتب الإرشاد

أو مجلس الشورى العام.

و- محاسبة أعضاء مكتب الإرشاد العام مجموعة وأفراداً، وقبول استقالتهم بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

ز- إعفاء المرشد العام أو قبول استقالته وفق المادة (19) من هذه اللائحة.

ح- تعديل اللائحة بناء على اقتراح يقدمه فضيلة المرشد العام أو مكتب الإرشاد، أو اقتراح يوافق عليه ثمانية

من أعضاء مجلس الشورى العام، ويجب إبلاغ الأعضاء بنص التعديل قبل شهر من النظر فيه، ويتم التعديل

بموافقة ثلثي الأعضاء.

مادة (40): يجتمع مجلس الشورى العام دورياً كل ستة أشهر في موعد يحدده لنفسه، ويجتمع استثنائياً بدعوة

من المرشد العام، أو من يقوم مقامه، أو بقرار من مكتب الإرشاد العام، أو بناء على طلب يوافق عليه ثلث أعضاء

مجلس الشورى، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة إلا في الحالات التي اشترط فيها نصاب

خاص، فإذا لم يتوفر العدد أجل الاجتماع لموعد آخر، وأعيدت الدعوة، ونص فيها على الموضوع، فإذا لم يتوفر

النصاب مرة أخرى؛ تطبق المادة (43) من هذه اللائحة.

وتكون القرارات صحيحة إذا صدرت بموافقة أغلبية الحاضرين المطلقة إلا في الحالات التي اشترط لها نصاب

خاص.

مادة (41): يجب أن يتم إبلاغ أعضاء المجلس بموعد أي اجتماع قبل انعقاده بشهر على الأقل، ويرفق مع

التبليغ جدول الأعمال إلا في الحالات الطارئة أو المستعجلة.

مادة (42): إذا تم استبدال أحد الأعضاء وفق النظام الداخلي للقطر الذي ينتمي إليه؛ فيجب إبلاغ مكتب الإرشاد العام بذلك فوراً.

مادة (43): إذا تعذر اجتماع مجلس الشورى العام يقوم مكتب الإرشاد العام بجميع صلاحياته، باستثناء تعديل اللائحة أو إعفاء المرشد العام حتى يتيسر اجتماع المجلس.

مادة (44): يشكل مجلس الشورى العام محكمة عليا تحدد صلاحياتها وأصول المحاكمة لديها في لائحة خاصة، وللمجلس حق تشكيل لجان تحكيمية عند الحاجة.

مادة (45): إذا قصر أحد أعضاء مجلس الشورى العام في واجباته، أو أخل بشروط عضويته نصحه فضيلة المرشد العام، فإذا تكرر منه نفس الفعل أحاله إلى المحكمة العليا إلا إذا كان عضواً بالمكتب فيتخذ بشأنه ما نص عليه في المادة (39).

مادة (46): تزول صفة العضوية عن عضو مجلس الشورى العام بقرار من المجلس نفسه أو المحكمة العليا، كما يجوز لفضيلة المرشد العام أن يأمر بإيقاف أي عضو عن عمله على أن يعرض أمره فوراً على الجهة المختصة للنظر في شأنه، وله أن يتظلم لدى فضيلة المرشد العام.

مادة (47): يؤلف مجلس الشورى العام من بين الإخوان العاملين أقساماً ولجاناً دائمة أو مؤقتة تختص كل منها بدراسة أحد أوجه النشاط، وتضع كل لجنة لائحة داخلية يقرها مجلس الشورى.

مادة (48): الأقسام واللجان المقترحة يمكن زيادتها أو إنقاصها حسب ما يقتضيه نشاط الجماعة.

الباب الخامس:

شروط عضوية القطر في التنظيم العالمي

مادة (49): يشترط لقبول أي تنظيم قطري عضواً في التنظيم العالمي تحقق الأمور الآتية:

أ- أن يكون لهذا التنظيم لائحة يعتمدها مكتب الإرشاد العام، وتتضمن وجود مجلس شورى ومكتب تنفيذي على الأقل إلى جانب المراقب العام.

ب- أن يعتمد المنهج التربوي للجماعة.

- ج- أن يكون له تأثير بارز على الساحة الإسلامية في بلده.
- د- يتم اعتماد عضوية القطر بقرار من مكتب الإرشاد العام بعد تحقق الشروط المنصوص عليها في كل من (أ)، (ب، ج).

الباب السادس:

تنظيم العلاقة بين القيادة العامة

وقيادات الأقطار

مادة (50): تتحدد العلاقة بين القيادة العامة للجماعة وقيادات الأقطار ضمن الدوائر التالية:

أ- الدائرة الأولى: وهي التي يجب فيها على قيادات الأقطار الالتزام بقرارات القيادة العامة متمثلة في فضيلة المرشد العام ومكتب الإرشاد العام ومجلس الشورى العام، وتشمل ما يلي:

- 1- الالتزام بالمبادئ الأساسية الواردة في هذه اللائحة، والالتزام بالمنهج الذي يقره مجلس الشورى العام.
- 2- الالتزام بفهم الجماعة للإسلام المستمد من الكتاب والسنة والمبين في الأصول العشرين.
- 3- الالتزام بسياسات الجماعة ومواقفها تجاه القضايا العامة، كما يحددها مكتب الإرشاد العام ومجلس الشورى العام.
- 4- الالتزام بالحصول على موافقة مكتب الإرشاد العام قبل الإقدام على اتخاذ أي قرار سياسي هام.

ب- الدائرة الثانية: وهي التي يجب فيها على قيادات الأقطار التشاور والاتفاق مع فضيلة المرشد العام أو مكتب الإرشاد العام قبل اتخاذ القرار، وتشمل جميع المسائل المحلية الهامة، والتي قد تؤثر على الجماعة في قطر آخر.

ت- الدائرة الثالثة: وهي التي تتصرف فيها قيادات الأقطار بحرية كاملة، ثم تعلم مكتب الإرشاد العام في أول فرصة ممكنة أو في التقرير السنوي الذي يرفع من المراقب العام، وتشمل هذه الدائرة ما يلي:

- 1- كل ما يتعلق بخطط الجماعة في القطر ونشاط أقسامها ونمو تنظيمها.
- 2- المواقف السياسية في القضايا المحلية، والتي لا تؤثر على الجماعة في قطر آخر شريطة الالتزام بالمواقف العامة للجماعة.
- 3- الوسائل المشروعة التي يعتمدها القطر لتحقيق أهداف الجماعة ومبادئها على ضوء أوضاعه وظروفه.

مادة (51): لكل قطر أن يضع لنفسه لائحة تنظم أوجه النشاط وتتفق مع ظروفه، مع مراعاة عدم تعارض أحكامها مع هذه اللائحة، ووجوب اعتمادها من مكتب الإرشاد العام قبل تنفيذها.

مادة (52): يقدم كل مراقب عام تقريراً سنوياً عن سير الدعوة ونشاط الجماعة والاقتراحات التي يراها كفيلة بتحقيق المصلحة في إقليمه إلى مكتب الإرشاد العام قبل انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس الشورى العام.

مادة (53): مساهمة في أعباء الدعوة يلتزم كل قطر بتسديد اشتراك سنوي تحدد قيمته بالاتفاق مع مكتب الإرشاد العام.

مادة (54): على الإخوان الذين يغتربون عن أوطانهم أن يخضعوا لقيادة الجماعة في القطر الذي يقيمون فيه.

سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.

(وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ (3))

الله أكبر والله الحمد

2) LAMPIRAN TENTANG PKS ADALAH CABANG IM DI INDONESIA, DI
AMBIL DARI WEBSITE RESMI IM DI MESIR

